

**PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

KHOIRUNISA
NIM.1302120278

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2017 M / 1438 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN
JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA TENTANG
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
KENA PAJAK**

NAMA : KHOIRUNISA

NIM : 130 212 0278

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Juni 2017

Pembimbing I
Menyetujui


Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, M.HI
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II

Enriko Tedja Sukmana S.ThI M.SI
NIP. 198403212011011012

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Jelita M.SI
NIP. 198201242009122002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Khoirunisa**

Palangka Raya, Juni 2017

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **KHOIRUNISA**
Nim : **130 212 0278**
Judul : **PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKARAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

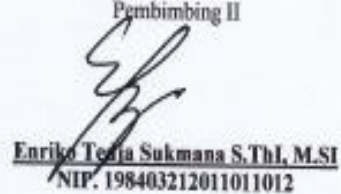
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, M.HI
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



Enrik Teja Sukmana S.ThI, M.SI
NIP. 198403212011011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK** oleh Khoirunisa NIM : 1302120278 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juni 2017

Palangka Raya 21 Juni 2017

1. **Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Dr. Sadiani, MH**
Penguji Utama/Anggota

(.....)

3. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, M.HI**
Penguji II/Anggota

(.....)

4. **Enriko Tedja Sukmana S.ThI**
Sekretaris Sidang/Anggota

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

ABSTRAK

Oleh KHOIRUNISA

Fenomena adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan peluang bagi para pengusaha Muslim, guna membangun kesadaran dalam menunaikan zakat. Rumusan masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana Perspektif pengusaha Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kecamatan Jekan Raya? (2) Bagaimana kesadaran pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? (3) Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mayoritas pengusaha tidak mengetahui adanya program tersebut. Perspektif pengusaha disertai dengan kesadaran untuk membayarnya meskipun kesadaran tersebut tidak murni dari kesadaran sendiri, kesadaran yang dilakukan berbentuk paksaan dari pihak pemerintah untuk membayar pajak. Zakat ditunaikan sesuai dengan kesadaran karena zakat sebagai kewajiban seorang Muslim. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha tidak terlalu diminati karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah baik Kantor BAZNAS maupun Kantor pajak, sehingga sampai saat ini program tersebut tidak terealisasi dikalangan pengusaha.

Kata Kunci : Perspektif, pengusaha Muslim, Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

**PERSPECTIVE OF MUSLIM ENTREPRENEUR IN JEKAN RAYA
SUBDISTRICT PALANGKA RAYA CITY ABOUT ZAKAT AS
DEDUCTIBLE OF TAXABLE INCOME**

ABSTRACT

By KHOIRUNISA

The phenomenon of the presence zakat as a deduction from taxable income it provides opportunities for Muslim entrepreneurs, to build awareness in the fulfillment of zakat. The formulation of the problem outlined in this paper are: (1) How does perspective of Muslim businessmen against of zakat as a deduction from taxable income in Jekan Raya subdistrict? (2) How awareness of Muslim entrepreneurs in Jekan Raya subdistrict at Zakat as a deduction from taxable income? (3) How to implement Zakat as a deduction from taxable income among Muslim businessmen Jekan Raya subdistrict?

This research is a field research by using descriptive qualitative approach. Object of this research is the perspective of Muslim entrepreneur in Jekan Raya subdistrict Palangka Raya city about zakat as deductible of taxable income while the subjects in this study is a Muslim businessman in Jekan Raya subdistrict, Palangkaraya city. The collections of data used in this study are observation, interviews, and documentation.

Results from this study is the perspective of Muslim businessmen Jekan Raya subdistrict, Palangkaraya city of zakat as a deduction from taxable income of the majority of employers are didn't know of any such program. Understanding of entrepreneurs accompanied by the awareness to pay even though awareness is not purely out of self-awareness, awareness that have been done is the compulsion from the government to pay taxes. Zakat accomplished in accordance with the awareness because zakat is the obligation of a Muslim. Implementation of zakat as a deduction from taxable income among the businessmen are not in demand because of the lack of socialization of good government BAZNAS Office and Tax Office, so far the program is not realized among entrepreneurs.

Keywords: Perspective, Muslim entrepreneurs, Zakat as a deduction from taxable income

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad saw Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT kami diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK.”**

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya. Sekaligus sebagai dosen pembimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.

4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Sadiani, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
6. Ibu Jelita M.SI selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya. Sekaligus dosen penasihat akademik selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.ThI, M.SI selaku dosen pembimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka serta teman-teman mahasiswa ESY yang telah membantu peneliti selama penelitian.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Wassalamua'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palangka Raya, 10 April 2017

Peneliti

Khoirunisa

1302120278

PERNYATAAN ORISINALITAS

هٰنِمْ اَللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

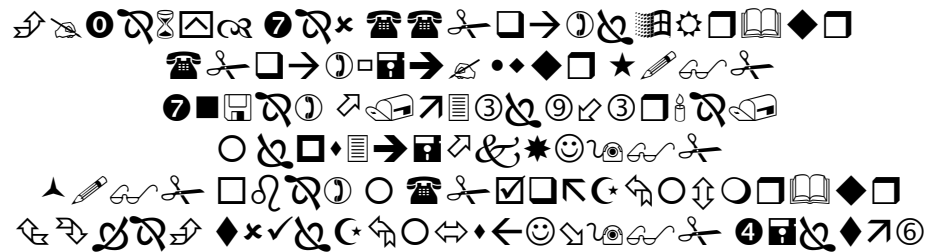
Palangka Raya, Juni 2017

Peneliti

Khoirunisa
Nim. 1302120278



MOTTO



**“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik” Qs. Al-baqarah**

(2) : 195.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan juga sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Dengan ini kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.

- ❖ *Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Syamsuddin Budi Leksono dan Rani Adiati ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta do'a-do'a yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku.*
- ❖ *Untuk kakak ku Hasna Syarifah dan adikku Nur Azizah terima kasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, kupersembahkan karya kecil ini untuk kalian.*
- ❖ *Buat kawan-kawanku Wahdiah, Deanti, Miyah, Adel, Teteh, Tika terima kasih atas bantuan, do'a, nasihat, canda tawa, tangis dan semangat yang kalian berikan selama kita kuliah bersama, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini. Terima kasih telah memberikan warna-warni dalam kehidupanku.*
- ❖ *Bapak Dr. Ahmad Dakhoir M.HI dan Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak yang sudah membantu, menasihati, dan mengajarkan saya selama saya mengikuti perkuliahan dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Serta tidak lupa kepada seluruh dosen pengajar dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.*
- ❖ *Semua teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013 terima kasih semuanya. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	Dammah	ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penelitiannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II DESKRIPSI TEORITIK	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Konsep Perspektif.....	12
2. Pengusaha Muslim.....	12
a. Pengertian Pengusaha	12
b. Dasar Hukum Berbisnis dalam Islam	14

c. Karakteristik Pengusaha Muslim	17
3. <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	19
a. Pengertian <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	19
b. Macam-macam <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	20
c. Tingkatan <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	21
4. Konsep Zakat dan Perpajakan	23
a. Pengertian Zakat	23
b. Dasar Hukum Zakat	24
c. Pengertian Pajak	34
d. Macam-macam Pajak.....	35
e. Fungsi Pajak.....	37
5. Kesadaran Hukum	38
a. Pengertian Kesadaran Hukum	38
b. Kesadaran Hukum Masyarakat	39
6. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	40
a. Kedudukan Zakat dalam Pajak Penghasilan	40
b. Syarat Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak	43
c. Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	46
C. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
C. Penentuan Subjek dan Objek.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Triangulasi Data.....	56
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Kecamatan Jekan Raya.....	59
2. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya.....	64
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian	67

C. Analisis Data	69
1. Perspektif Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya.....	69
a. Pola Pembayaran Zakat di Kota Palangka Raya.....	69
b. Muzakki dikalangan Pengusaha di Kecamatan Jekan Raya	78
c. Perspektif Pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	82
2. Kesadaran Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	87
a. Sistem Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Palangka Raya.....	87
b. Budaya Zakat Pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya	95
3. Implementasi Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya.....	102
a. Sinergi Hubungan Antara Sistem Pembayaran Zakat dan Pembayaran Pajak di Kota Palangka Raya	102
b. Sosialisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Palangka Raya.....	109
c. Implementasi Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya 114	
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Jekan Raya.....	51
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jekan Raya..	52
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jekan Raya..	52
Tabel 2.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Jekan Raya.....	53
Tabel 2.5 Identitas Subjek Penelitian.....	57
Tabel 2.6 identitas Informan Penelitian.....	58

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
IPB	: Institut Pertanian Bogor
PDB	: Produk Domestik Bruto
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
UMP	: Upah Minimum Provinsi
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-undang
PPh	: Pajak Penghasilan
PPn	: Pajak Pertambahan Nilai
PBB	: Pajak Bumi Bangunan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian Perdagangan
NPWP	: Nomor Pajak Wajib Pajak
ZIS	: Zakat, Infak, Sedekah
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2012, bahwa total penduduk Indonesia berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88% beragama Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa. Jumlah penduduk Muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 3,4% dari total PDB. Berdasarkan persentase tersebut, maka potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 217 triliun setiap tahun.¹

Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai warga Negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena perundang-undangan yang telah mewajibkan perihal ini. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

¹Ahmad Dakhoir, *Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015. h. 7

Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro dan kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi kesepahaman yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.²

Secara realitas zakat dan pajak merupakan dualisme yang tidak dapat dipisahkan, dalam dualisme tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak. Adanya zakat dan pajak ini pengelolaan sangat diperlukan untuk tercapainya prinsip yang adil dan berimbang. Jika melihat potret pengelolaan zakat di dunia Islam memiliki karakteristik dan perbedaan sistem dalam mengelola zakat para *muzakki*, di Indonesia pengelolaan hanya bersifat sukarela sedangkan Negara Arab Saudi, Sudan, Yaman, dan Libya bersifat wajib yang dimana karakteristik otoritas kewenangannya dikendalikan oleh Negara. Indonesia dalam mengelola zakat

²Nur Kholis, “ Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia” Diambil dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia> Diakses pada Hari Rabu 01 Februari 2017 pukul : 14.30 WIB

dikendalikan oleh Negara dan masyarakat melalui lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS dan melalui lembaga yang dibentuk masyarakat atau LSM yaitu lembaga Amil Zakat dan Organisasi pengelola zakat lainnya.³

Dikatakan dunia wirausaha saat ini dirasakan sangat penting kehadirannya karena semakin banyaknya wirausaha maka sangat terbantunya perekonomian rakyat seperti mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Demi memenuhi kebutuhan, Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan pribadi melalui aktivitas perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan merestruksiasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan moral.⁴

Pada hakikatnya hasil dari keuntungan tersebut ada hak orang lain yang membutuhkan, sehingga harta yang dihasilkan mendapatkan keberkahan dan menjadikan harta tersebut bernilai dihadapan Allah dan memiliki manfaat untuk orang lain. Kesadaran masyarakat mengenai zakat terkadang belum terealisasi dikarenakan kepedulian terhadap sesama sedikit berkurang, rasa individualisme yang tinggi dipengaruhi oleh globalisasi ataupun gaya hidup dari seseorang yang sangat materialistis dan konsumtif yang datang dari dunia barat.

³Ahmad Dakhoir, *Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah...* h. 184

⁴Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang :Intimedia, 2014. h. 51

Khususnya pengusaha yang berpenghasilan melebihi kapasitas UMP (Upah Minimum Provinsi) harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh sumber hukum yaitu *al-Qur'ān* dan hadis. Saat ini zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan alternatif untuk para pengusaha agar membayar zakat sekaligus dapat mengurangi pajak penghasilan. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini memberikan angin segar bagi para pengusaha Muslim, untuk memberikan motivasi serta membangun kesadaran pengusaha dalam menunaikan zakatnya. Sehingga kewajiban zakat dan kewajiban pajak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang, terutama bagi pengusaha Muslim.

Akan tetapi kebijakan pemerintah mengenai perihal ini dirasa masih minim dalam merealisasikannya, karena kebanyakan dari pengusaha terkadang masih melalaikan kewajiban pajak yang telah ditentukan. Dilihat dari sisi tersebut, berarti perundang-undangan yang diberlakukan tidak tersosialisasi dengan baik dan perspektif mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dirasa kurang adanya sosialisasi bagi pengusaha. Hal ini sebagaimana observasi peneliti kepada para pengusaha Muslim Palangka Raya bahwa sebagian dari mereka belum memahami secara maksimal tentang zakat merupakan pengurang nilai harta.

Berdasarkan dari permasalahan diatas menarik peneliti untuk melihat lebih detail bagaimana sebenarnya perspektif zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di dunia usaha terutama pengusaha Muslim. Atas dasar tersebut maka peneliti memfokuskan pada pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengenai perspektif pengusaha Muslim tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan judul :**“PERSPEKTIF PENGUSAHA MUSLIM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perspektif pengusaha Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kecamatan Jekan Raya?
2. Bagaimana kesadaran pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
3. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan masalah diatas, tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perspektif pengusaha Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kecamatan Jekan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesadaran pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan IAIN Palangka Raya khususnya jurusan Ekonomi Islam. Sebagai bahan pengkajian dalam perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program studi Ekonomi Syariah di IAIN Palangkaraya. Rujukan atau referensi perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak. Selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Deskripsi Teoritik. Memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep serta kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian. Memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, serta analisis data.

Bab V, Penutup. Memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelaahan ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat terhadap hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

Skripsi Apriliana (2010), “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan kedua tersebut. Pada perlakuan pertama, perlakuan atas kewajiban zakat dan pajak lebih besar dibandingkan dengan perlakuan yang kedua. Zakat sebagai pengurang PKP artinya zakat dikurangkan dari penghasilan neto, sedangkan zakat sebagai kredit pajak artinya zakat dikurangkan dari PPh terutang. Analisis terakhir dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara pajak dan zakat.⁵

Skripsi Baroto Widagdo (2009), “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama

⁵Apriliana, Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan, Skripsi UIN Jakarta 2010, h. viii

Sukoharjo)”tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu, 1) mendeskripsikan dan memahami gambaran pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 di kantor pelayanan pajak. 2) mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dikalangan masyarakat Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui pencarian data mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menanggapi masalah yang dikaji, data informasi yang telah terkumpul dari penelitian dilakukan analisa secara kualitatif.⁶

Skripsi Mariah (2011),“Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi)”. Hasil dari penelitian ini yang diperoleh dari pernyataan beberapa narasumber bagian pengelola lembaga zakat dan bagian kantor perpajakan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dalam menentukan apakah zakat dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak ini tergantung pada sistem yang dianut oleh suatu Negara yang ditetapkan dalam peraturan yang telah ada. Sedangkan di Indonesia dengan telah diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat penghasilan sebagai instrumen penggalangan dana publik bagi keperluan Negara disamping instrumen pajak penghasilan yang telah ada lebih dulu. disisi lain

⁶Baroto Widagdo, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Sukoharjo) Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

undang-undang pajak penghasilan mencoba untuk mengakomodasi undang-undang pengelolaan zakat kedalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pajak penghasilan.⁷

Skripsi Khoirunisa (2017)“Perspektif Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.”. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu Perspektif pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menunjukkan ketidakpahaman karena tidaknya adanya ketegasan dari pemerintah untuk mensosialisasikannya. Kesadaran pengusaha akan membayar zakat dan pajak didasari dari kesadaran diri sendiri, walaupun kesadaran tersebut tidak murni dari kesadaran sendiri, adanya keterpaksaan yang membuat pengusaha sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Serta implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pegusaha tidak terealisasi dengan baik, karena sosialisasi dari pemerintah kurangnya gerakan untuk mengampanyekan hal ini.⁸

⁷Mariah, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi) Skripsi Universitas Islam Negeri 2011.

⁸Khoirunisa, Perspektif Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Apriliana (2011), Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan	- Mengkaji mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Analisis terakhir dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara pajak dan zakat.
2.	Baroto Widagdo (2009) Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)	- Mengkaji mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak - Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Sukoharjo.
3.	Mariah (2011) Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi)	- Mengkaji mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Hasil dari penelitian ini mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajaktergantung pada sistem yang dianut oleh suatu Negara yang ditetapkan dalam peraturan yang telah ada.
4.	Khoirunisa (2017) Perspektif Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	- Mengkaji mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak - Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketidakpahaman adanya zakat sebagai PPKP, kesadaran pengusaha bukan dari kesadaran murni mengenai pembayaran pajak

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

B. Kerangka Teori dan Konsep

1. Konsep Perspektif

a. Pengertian Perspektif

Perspektif dapat diartikan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dapat juga diartikan sebagai kerangka, konseptual, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.⁹ Jadi dapat disimpulkan perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.

2. Pengusaha Muslim

a. Pengertian Pengusaha

Manusia diberikan akal untuk membedakan dari makhluk yang lainnya, dengan akal manusia dapat bertahan hidup dan mencari rezeki dengan berbagai cara. Maka dari itu dengan akal dapat memunculkan ide untuk mendapatkan penghasilan, agar terpenuhi kebutuhan hidupnya tanpa cara meminta-minta dan bergantung dengan orang lain. Melalui jalan wirausaha salah satunya dapat menjadikan seseorang memiliki inovasi dan kreasi, agar seseorang mempunyai pekerjaan dan aktivitas kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya.

⁹Admin, “Definisi Menurut Para Ahli” diambil dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang> (diakses pada Hari Selasa 04 Juli 2017 pukul 10.00 WIB)

Secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jiwa kewirausahaan mendorong mental seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Pemilihan bidang usaha seharusnya disertai dengan berbagai pertimbangan, seperti minat, modal, kemampuan, dan pengalaman sebelumnya. Jika belum memiliki pengalaman sebelumnya, seseorang dapat menimba pengalaman dari orang lain.¹⁰

Menurut David E. Rye mendefinisikan wirausaha :

Wirausaha adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha baru. Wirausaha berani mengambil risiko yang terkait dengan proses pemulaian usaha. Istilah wiraswasta sering dipakai secara tumpang tindih dengan istilah wirausaha.¹¹

Menurut Zimmerer menyatakan bahwa :

Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.¹²

Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri. Wirausaha/wiraswasta adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang pada

¹⁰Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h. 19

¹¹PO Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : Andi, 2011. h. 35

¹²Kasmir, *Kewirausahaan*,... h. 20

umumnya memiliki keberanian dalam mengambil risiko terutama dalam menangani usahanya dengan berpijak pada kemampuan sendiri.¹³

Menurut Qardawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateriil (spritual). Kebendaan yang profan (intrasenden) baru bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spritual yang transenden (*ukhrawi*).¹⁴

b. Dasar Hukum Berbisnis dalam Islam

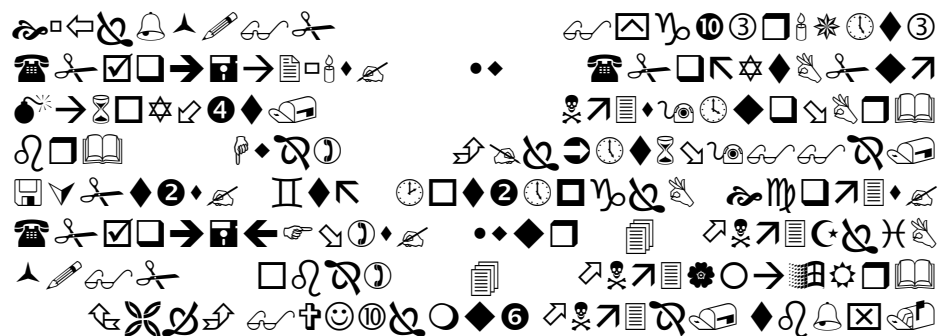
Bisnis dan perdagangan dalam kacamata Islam menempati posisi terhormat. Tidak sekedar aktivitas yang mengedepankan prinsip-prinsip memperoleh keuntungan secara maksimal, tetapi juga diikat oleh bingkai hukum dan moral agama. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah.¹⁵

¹³PO Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan..* h. 36

¹⁴Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm. 70

¹⁵Muhammad, dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam...* h. 37

Bisnis dalam *al-Qur'ān* dijelaskan melalui kata *tijārah*, yang mencakup dua makna yaitu perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Adapun makna kata *tijārah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.¹⁶ Beberapa ayat yang menerangkan tentang bertransaksi yang adil diantara manusia yaitu :



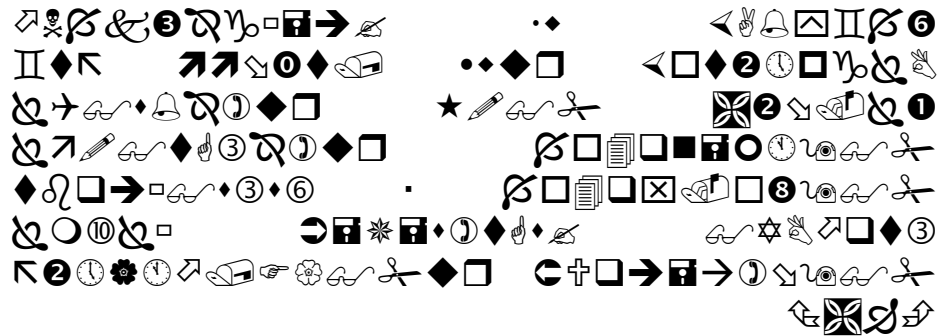
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi suka sama suka diantaramu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)¹⁷

Allah SWT. memperingatkan orang beriman agar tidak memakan harta manusia dengan dengan cara bathil, yaitu dengan cara tidak diperbolehkan syariat seperti mencuri, korupsi, riba, perjudian dan

¹⁶Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2013. h. 7

¹⁷ Departemen Agama Reuplik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989.h.122

sejenis itu semua. Kecuali dengan cara yang terhormat, seperti dagang atau perniagaan yang dihalalkan oleh Allah SWT.



Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.” (QS. An-Nur [24]: 37)¹⁸

Ayat ini menyebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat. perniagaan dalam arti yang khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas untuk mengingat Allah. Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi suatu kontrol bagi seorang peniaga dan pengusaha, agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.¹⁹

Zakat menempati posisi yang sangat strategis dalam suatu bisnis, karena siapa pun yang sukses dalam bisnisnya pasti akan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan yang transenden dalam

¹⁸ Ibid...h. 550

¹⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam...* h. 8

masyarakat kepada seorang pebisnis, karena zakat bisa menumbuhkan loyalitas kepada pengusaha dan selanjutnya bisa memperkuat perusahaan.²⁰

c. Karakteristik Pengusaha Muslim

Ketika seseorang berbicara tentang kepercayaan yang transeden, maka ia akan selalu menanggap kepercayaan tersebut adalah integritas. Integritas adalah satu-satunya pembentuk kepercayaan diri seorang pengusaha. Mungkin anggapan ini bagi sebagian orang merupakan suatu hal yang benar, tetapi akan sangat tidak bijaksana apabila menganggap integritas adalah satu-satunya pembentuk kepercayaan diri seorang pengusaha. Berikut ini beberapa hal yang erat kaitannya dengan integritas seorang pebisnis, yang bersumber dari ajaran Islam yang transenden :²¹

1) Kejujuran Manajerial dan Komitmen

Kejujuran merupakan fondasi kepercayaan yang mutlak harus ada dalam diri seorang pengusaha, ketika kejujuran hilang maka suatu bisnis akan minus kepercayaan dari mitra bisnisnya. Hal yang menjadi penting untuk dipahami tentang komitmen adalah, banyak orang yang mempunyai komitmen dalam hidupnya, akan tetapi tidak mengukur kemampuannya terlebih dahulu. Yang terjadi adalah komitmennya tersebut menjadi suatu angan-angan kosong,

²⁰ *Ibid...* h. 35

²¹ *Ibid...* h. 158

yang tidak bisa dijalankan, seorang pebisnis menjadi seorang yang tidak mengindahkan etika sosial karena terlalu terobesesi dengan komitmen yang dibuatnya.

2) Menjaga dan Mempertahankan Amanah

Amānah lebih dari kejujuran, karena *amānah* merupakan *feedback* dari kepercayaan yang diberikan kepada seorang pengusaha oleh mitra bisnisnya. Ketika *amānah* dimaknai dengan penjagaan terhadap segala karunia Allah, maka pembahasan *amānah* akan masuk ke ranah hubungan antar individu, antar golongan dan antar masyarakat.

3) Berbisnis adalah Beribadah

Konsep ibadah dalam diri seorang pengusaha meliputi segala suatu kontrol bagi diri seorang pengusaha agar menjadi mawas diri. Ketika pengusaha sudah menganggap segala aktivitas bisnisnya sebagai suatu ibadah, maka akan membawa dampak yang sangat besar dalam kultur perusahaan, organisasi nirlaba, hubungan antar mitra kerja, hubungan dalam pasar dan hubungan dalam masyarakat.

4) Keadilan yang Membawa Kesejahteraan

Setiap aktivitas bisnis satu hal utama yang harus menjadi prinsip bagi seorang pengusaha, yaitu menjunjung tinggi keadilan. Adil berarti menghindari berbagai macam praktik transaksi yang

tidak benar. Adil meliputi kebenaran yang datang dari berbagai macam cara, baik melalui cara memandang, berbicara, berperilaku, dan bekerja.²²

3. *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāsid asy-syarī'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun masalah adalah kemanfaatan atau kebaikan.²³

Perlu diketahui bahwa syara' tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Tidak dapat dipahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. Disamping itu, kerap kali juga nash-nash yang satu dengan lainnya bertentangan. Dalam hal ini tidak ada yang dapat menghilangkan pertentangan tersebut dan menaufiqkan antara keduanya, selain dengan mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' tentang nash-nash.²⁴

²²*Ibid...* h. 158-161

²³Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...* h.31

²⁴Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Maqāsid asy-syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qur'ān* dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat *al-Qur'ān* dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat.²⁵

b. Macam-macam *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Memelihara segala sesuatu yang *dharūri* bagi manusia dalam penghidupan mereka. Maksud dari penjelasan ini adalah urusan-urusan yang *dharūri* itu segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang *dharūri* itu kembali pada lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Menyempurnakan segala yang dihayati manusia, urusan yang dihayati manusia ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran *taklīf*

²⁵Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005. h. 233

dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran *taklīf* dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

- 3) Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat, yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpakepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera. Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.²⁶

c. Tingkatan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharūriyat*, kebutuhan *hājiyat*, dan kebutuhan *Tahsīniyat*.

- 1) Kebutuhan *Dharūriyat*

²⁶*Ibid...* h. 128-129

Jenis *maqāsid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata diakhirat kelak.²⁷

2) Kebutuhan *Hājiyat*

Kebutuhan hajiyyat merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.²⁸

3) Kebutuhan *Tahsīniyat*

Tujuan jenis *maqāsid* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya

²⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005. h. 382

²⁸Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih...*, h. 235

bertindak sebagai penerang, pelengkap, dan penghias kehidupan manusia.²⁹

4. Konsep Zakat dan Perpajakan

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.³⁰

Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan tetapi kata itu bisa juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) dalam pandangan Yusuf Qardhawi kata zakat dalam bentuk ma'rifat definisi disebutkan tiga puluh kali dalam *al-Qur'ān* diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat surat Al-Mu'minun 1-4 menurut penelitiannya dalam *al-Qur'ān* tiga puluh kali kata zakat disebutkan delapan kali terdapat surat-surat yang diturunkan

²⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 383

³⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014. h. 247

di Makkah (Makkiyah) sedangkan yang lainnya di Madinah (Madaniyah).³¹

Zakat merupakan instrument ekonomi yang mampu mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi.³²

b. Dasar Hukum Zakat

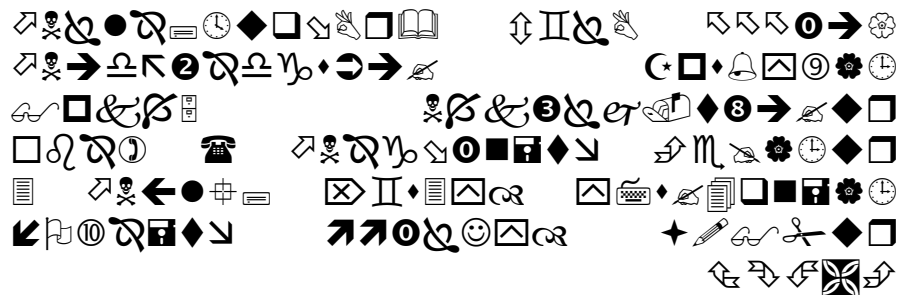
1) *al- Qur'ān*

Mengenai pengertian dari zakat yang sudah dipaparkan, disini peneliti perlu untuk mengelompokkan sumber yang menjadi landasan penguat untuk zakat. adapun makna zakat itu sendiri adalah harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan terdapat

³¹Yusuf Qardhawi, *Fikh Al-zakat*, Beirut : Muasaah al-risalah, Juz, I 1997. Cet. 4 h. 39

³²Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*... h. 249

didalamnya kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah 9 : 103



Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 9 : 103)³³

Setelah turunnya ayat yang mewajibkan untuk berzakat serta dari makna zakat itu sendiri memberikan makna bagi kehidupan sosial bahwa apabila zakat itu berjalan maka zakat itu bisa menumbuhkan rasa tolong menolong antara si kaya dan si miskin tidak ada perbedaan antar umat dan dengan zakat juga memperat hubungan antar sesama seperti dalam firman Allah QS. At-Taubah : 9 : 71



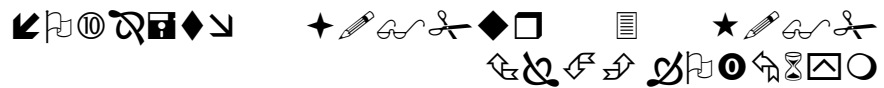
³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989. h. 297-298

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian dari mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 9 : 71)³⁴

Adapun ayat selanjutnya menerangkan bahwa zakat yang sudah dikeluarkan oleh muzaki diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut dan yang dimaksud orang yang berhak yang menerima zakat disini 8 (delapan) golongan yang dijelaskan dalam QS. At- Taubah : 9 : 60

[illegible]

³⁴*Ibid.*... h. 291



Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 9 : 60)³⁵

Adapun ayat yang menjelaskan harta yang beredar tidak hanya dikalangan orang kaya saja, tetapi harta tersebut dapat dirasakan oleh kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Seperti firman Allah pada QS. Al-Hasyr : 59: 7



Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari

³⁵Ibid... h. 288

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr : 57 : 9)

Surat Al-Hasyr ayat 7 Allah SWT menjelaskan aspek lain tentang pelarangan penimbunan kekayaan. Menurut para *mufasssir*, ayat ini berkaitan dengan wilayah Bani Nadhir yang jatuh ke tangan Muslimin tanpa melalui suatu pertempuran. Semua aset yang ditinggalkan mereka dipandang sebagai *fai* Negara dan orang-orang yang berhak menerimanya telah ditentukan *al-Qur'ān*, yakni kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir.³⁶

al-Qur'ān memberikan rasionalisasi terhadap ketentuan di atas, yakni agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya. Dengan demikian, penumpukan dan dan penimbunan kekayaan oleh sebagian kecil individu ataupun kelompok tidak diperbolehkan.³⁷

2) Hadis

³⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004. h. 30

³⁷ *Ibid.*

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, beberapa hadis yang populer mengenai zakat adalah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ زَكَاةٍ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Dari Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun atas lima pondasi pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah mendirikan shalat melaksanakan haji menunaikan zakat dan berpuasa dibulan ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

Hadis tersebut adalah sebagian nash yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan beberapa hadis lainnya bersifat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti jenis harta yang dizakati, nisab, haul, asnaf (golongan) yang terkait dengannya. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal r.a ke Yaman beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ

³⁸ Achmad Sunarto, *Mutiara Hadis Bukhari- Muslim*, Surabaya: Karya Agung, t.th. h. 353

اللّٰهُ افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على
فقرائهم.

“ Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau bersabda: Ajaklah mereka ke arah syahadat, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa diriku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka bersedia mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima kali sholat di dalam sehari semalam. Sekiranya mereka mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka.”³⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban zakat adalah sebuah salah satu perkembangan Islam di Mekkah secara mutlak tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin belaka. Dan pada tahun kedua setelah hijrah menurut keterangan yang mashur ditetapkan besar dan jumlah jenis harta yang dijelaskan secara terperinci.⁴⁰

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat ada dua jenis yaitu zakat fitri dan zakat mal berikut penjelasan dari zakat fitrah dan zakat *mal* :

- 1) Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan

³⁹Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari Prilaku Kehidupan Rasulullah SAW*, Surabaya : Pustaka Adil, 2010. h. 317

⁴⁰Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-sunnah* 3, Bandung : Al-Ma'arif, 1990. h. 7

keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim baik laki-laki, perempuan, kecil ataupun dewasa. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun mulai diwajibkannya puasa ramadhan. Ketentuan zakat fitrah dibayarkan sebanyak dua setengah kilogram (2,5 kg) bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.⁴¹

- 2) Zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu pula. Ketentuan zakat harta pada umumnya terkait dengan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah minimal dari harta seseorang yang boleh dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah harta yang telah mencukupi nisabnya dan telah mencapai waktu satu tahun.⁴²

d. Harta yang Wajib Zakat

Secara hakiki semua harta yang dimiliki oleh seseorang itu terkena wajib zakat. Namun, secara hukum harta yang wajib dizakati ada lima yaitu : harta kekayaan, hewan ternak, harta perniagaan, harta pertanian,

⁴¹ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013. h. 25

⁴² *Ibid.* h. 26

dan hasil tambang. Agar lebih jelas dirinci satu persatu lima macam harta yang wajib dizakati.

1) Harta kekayaan

Emas dan perak merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab dan haul. Nisab emas adalah 92,6 gram, nisab perak 624 gram. Bila ada seseorang yang menyimpan emas selama setahun dan beratnya mencapai 93,6 gram atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Hewan Ternak

Jenis binatang atau hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi, kerbau, dan kambing. Hewan ternak yang lain pun akan dikenakan zakatnya jika memenuhi nisab atau telah mencapai nisab seharga hewan-hewan tersebut.

3) Zakat Perdagangan

Barang yang diperjualkan untuk memperoleh keuntungan, nilainya sama dengan uang atau emas. Nisab zakat harta perniagaan adalah seharga emas 93,6 gram. Begitu pula besarnya zakat yang harus dibayarkan, yakni 2,5% .

4) Harta Pertanian

Hasil pertanian atau perkebunan ada yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang wajib dizakati misalnya padi, jagung, gandum, dan tanaman sejenis yang merupakan makanan sehari-hari (makanan pokok). Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kurma dan anggur.

Bila perkebunan tersebut dikelola tanpa memerlukan biaya apapun, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 10% dari hasil panen. Perkebunan yang dikelola dengan memerlukan biaya pemeliharaan, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 5% dari seluruh panennya.

5) Hasil Tambang dan Rikaz (barang temuan)

Jika barang tambang berupa emas atau perak, maka wajib yang dizakati jika telah mencapai nisab baik telah berjalan setahun atau belum. Jadi, setiap kali seorang Muslim mengeluarkan barang tambang, wajib menzakatinya jika telah mencapai nisab. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan yakni 5% dari hasil penambangan keseluruhan. Rikaz artinya barang yang terpendam dari masa jahiliyah atau sebelum Islam. Sedangkan barang tambang artinya barang yang ada di dalam tanah kemudian digali. Barang ini berupa batu bara, timah, minyak bumi, belerang, dan granit. Baik itu dikelola oleh Negara, perorangan, maupun swasta wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³

Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat menyatakan bahwa :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴⁴

Demikian dapat disimpulkan pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak Negara. Kadar dan objek pajak adalah didasarkan pada keputusan Negara. Meskipun

⁴³Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru) Edisi 3*, Jakarta : PT. Indeks, 2013. h. 3-4

⁴⁴Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat, 2011. h. 1

pajak merupakan iuran rakyat, sifatnya dapat dipaksakan, bukan sukarela.⁴⁵

d. Macam-macam Pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan macam macam pajak, yang dibagi kedalam perbedaan pajak menurut golongan, perbedaan pajak menurut sifatnya dan perbedaan pajak menurut lembaga pemungutannya, adapun dari perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :⁴⁶

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

⁴⁵Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. h. 190

⁴⁶Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus..* ,h. 7

atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif berikut uraiannya :⁴⁷

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Negara dan pajak Daerah berikut urainnya :⁴⁸

- 1) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : pajak kendaraan bermotor,

⁴⁷Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011. h. 5

⁴⁸Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus...* h.8

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, dan pajak hiburan.

e. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :⁴⁹

1) Fungsi penerima

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya.

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur

⁴⁹Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia...* h. 5

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.⁵⁰

5. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁵¹ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : Widia Karya, 2005.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey :

Kesadaran hukum mengacu cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-intitusi hukum, yaitu Perspektif-Perspektif yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, dan memberikan kerangka sosial yang berwujud norma-norma.⁵²

b. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku

⁵²Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Tapanuli Selatan : Universitas Muhammadiyah t.th, h. 80

ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.⁵³

6. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

a. Kedudukan Zakat dalam Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan itulah yang disebut objek pajak. Undang-undang perpajakan menyebutkan macam-macam objek pajak dan bukan

⁵³*Ibid...* h. 84-85

objek pajak. Adapun yang bukan objek pajak salah satunya yaitu zakat sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berbunyi “ bantuan atau sumbangan termasuk zakat termasuk yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diterangkan bahwa dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang boleh sebagai pengurang adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.⁵⁴

Peraturan Menteri Keuangan nomor 254 /PMK.03/2012 mengatur bahwa pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan/ oleh wajib pajak badan dalam negeri hal ini juga diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER6/PJ/2011 pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- 2) Dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Jadi kedudukan dalam pajak penghasilan sebagai salah satu pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu posisi zakat dalam SPT Tahunan dari Peraturan menteri Keuangan dan Dirjen

⁵⁴ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pajak adalah setelah Penghasilan bruto dan berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak.⁵⁵

b. Syarat Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak

Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada penghasilan harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, mengenai hal itu terdapat pada Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak penghasilan.⁵⁶

- 1) Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
- 2) Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Mengenai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang perubahan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang

⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan nomor 254 /PMK.03/2012.

⁵⁶ M. Muzayyin Habib Irsyad, Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik, UIN Sunan Ampel 2015. h. 38

ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain memuat badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut :
 - a) LAZ Dompot Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
 - b) LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
 - c) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
 - d) LAZ Yayasan Baitul maal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001.
- 3) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
 - a) LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002.

- b) LAZIS Nahdhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006.
 - c) LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006.⁵⁷
- 3) Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak final.

Adapun penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- a) Bunga deposito dan tabungan
 - b) Bunga obligasi dan surat utang Negara
 - c) Bunga simpanan koperasi (OP)
 - d) Hadiah undian
 - e) Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivatif dibursa
- 4) Zakat Penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurangan PPh pada tahun zakat tersebut dibayarkan.
- 5) Melampirkan fotokopi lembar pertama surat setoran zakat atau fotokopi.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid...* h. 40-41

c. Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Didalam peraturan tersebut :

- 1) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- 2) Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- 3) Bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank harus ada validasi petugas bank.
- 4) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak

⁵⁸ *Ibid...* h. 42-43

dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.

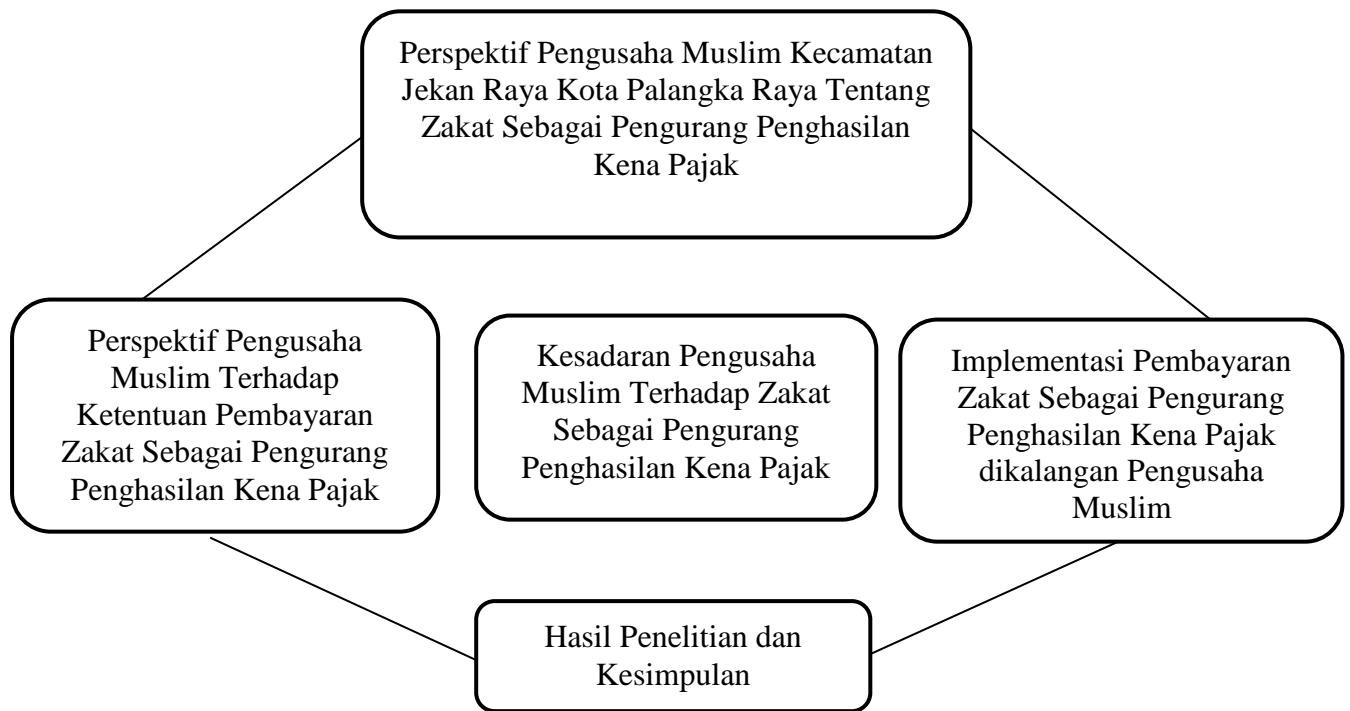
- 5) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan bruto.⁵⁹

C. Kerangka Pikir

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, yang dimana pembayaran zakat tersebut diberikan kepada yang berhak melalui lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kewajiban zakat dan pajak harus dipenuhi terutama bagi pengusaha Muslim, Perspektif dan kesadaran dari pengusaha merupakan modal untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena zakat dan pajak merupakan instrumen ekonomi yang terbilang dapat menjadikan masyarakatnya terhindar dari kemiskinan.

Maraknya pengusaha pada saat ini memotivasi bagi masyarakat untuk bisa melakukan usaha walaupun dimulai dari tahap yang kecil, dengan mengandalkan usahanya masyarakat dapat menghasilkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta ekonomi bisa meningkat dan mampu untuk membayar zakat dan pajak. Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁹ *Ibid...* h. 42-43

Gambar.1 Peta Pemikiran (*Mind Map*)

Diolah sendiri oleh peneliti

Pertanyaan Penelitian :

1. Apakah Anda memahami mengenai adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2. Bagaimana pembayaran zakat yang dilakukan oleh Anda apakah ada pemotongan gaji karyawan khusus untuk pembayaran zakat?
3. Apakah dalam menunaikan kewajiban zakat dan pajak ini dipenuhi dengan kesadaran atau karena paksaan?
4. Apakah dalam melakukan bisnis, menjadikan bisnis adalah ibadah?
5. Apakah Anda menggunakan prinsip adanya kejujuran terhadap konsumen atau mitra kerja Anda?

6. Apakah terasa terbebani dalam mengeluarkan zakat dan pajak?
7. Apakah dalam membayar zakat, Anda membayar ke lembaga pemerintah atau langsung kepada yang membutuhkan?
8. Apakah kebijakan pemerintah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah baik belum dalam mensosialisasikannya?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah judul skripsi ini disetujui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, serta telah diseminarkan dan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian. Dengan perencanaan alokasi waktu 2 bulan penelitian.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Alasan melakukan penelitian disini karena wilayah yang ditempati oleh pengusaha Muslim berada di wilayah tersebut, dan beberapa penduduk di Kecamatan Jekan Raya ini adalah pengusaha yang tergolong besar atau menengah dan menghasilkan omzet di atas rata-rata, yang dimana penghasilannya tersebut mampu untuk membayar zakat dan pajak penghasilan atas kegiatan usaha yang dilakukan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data atau menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu tempat adanya pengusaha Muslim yang berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.⁶⁰ Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

C. Penentuan Subjek dan Objek

Subjek dari penelitian ini adalah pengusaha Muslim yang berada di Kecamatan Jekan Raya. agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dalam melakukan pengambilan subjek penelitian peneliti menggunakan salah satu jenis dari teknik *non probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*.⁶¹ Sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁶²

Adapun kriteria subjek peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha yang beragama Islam.

⁶⁰Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. h. 28

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 309

⁶¹Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013. h. 128

⁶²Nasution, *Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

2. Pendapatan usaha berkisar ± 10 hingga 50 juta perbulan.
3. Memiliki usaha yang menghasilkan barang maupun jasa.
4. Usaha yang dijalankan telah 5 tahun berdiri.

Berdasarkan karakteristik subjek di atas, maka hal ini peneliti menemukan 5 (lima) orang pengusaha yang dijadikan subjek penelitian yaitu Bapak HH, Saudara P, Ibu AW, Saudara AWK, dan Saudara AH. Ditambah dengan 5 informan sebagai data penunjang atau data sekunder. Tujuan penggunaan informan tambahan agar penggalan data dapat dilakukan dengan maksimal.

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

⁶³*Ibid...* h. 101

ditentukan⁶⁴. Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan teknik yang mendukung yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁶⁵

Dari Perspektif observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulandata yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶⁶

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 62.

⁶⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 115.

⁶⁶*Ibid.*

langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁶⁷

Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah tempat usaha, dan bidang usaha yang dijalankan

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing.⁶⁸ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁹

Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur. Dengan menggunakan teknik ini peneliti meminta keterangan melalui dialog langsung kepada pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk mendapatkan informasi yang valid dari sumber data atau objek dari penelitian. Melalui tahap wawancara ini secara umum peneliti ingin menggali data tentang :

⁶⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm. 84.

⁶⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 179.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.135

- a. Perspektif Pengusaha Muslim Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- b. Kesadaran Pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.
- c. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.⁷⁰

Penggunaan teknik dokumentasi ini juga dapat melengkapi data-data memperkuat keakuratan data yang telah diperoleh. adapun data-data tersebut meliputi :

⁷⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006. h. 225-226

- a. Profil Kecamatan Jekan Raya
- b. Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palangka Raya
- c. Bukti pembayaran zakat dan pajak pengusaha berupa kuitansi.
- d. Surat Izin Pendirian Usaha

E. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan Perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5)

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷¹

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) dari 5 (lima) teknik triangulasi data yang telah dijelaskan di atas yaitu 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Oleh karena itu dalam melakukan pengabsahan data dengan cara membandingkan data yang sudah peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data dibutuhkan proses dalam melakukannya, ada beberapa teknik yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dengan bukunya yaitu Analisis Data Penelitian Kualitatif, berikut ini adalah teknik analisis yang digunakan :

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa proses pemilihan yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..h. 178

2. Data *Reduction* adalah proses eliminasi data dengan menajamkan, menggolongkan dan memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan dan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
3. Data *Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. Data *Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁷²

⁷²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005, h. 69-70.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Jekan Raya

a. Letak Geografis Kecamatan Jekan Raya

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` – 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan. Kecamatan Jekan Raya merupakan wilayah dari Kota Palangka Raya, peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai Kecamatan Jekan Raya.⁷³

Secara administrasi Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu di antara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sekaligus juga Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Kecamatan Jekan Raya memiliki luas wilayah 352,62 Km² serta membawahi 4 Kelurahan, antara lain :⁷⁴

- 1) Kelurahan Menteng : 31.00 Km²
- 2) Kelurahan Palangka : 24,75 Km²

⁷³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2016. h. 3.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya dalam Angka 2014*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2014. h. ix

3) Kelurahan Bukit Tunggul : 237, 12 Km²

4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75 Km²

Kecamatan Jekan Raya yang membawahi dari 4 Kelurahan memiliki luas dan wilayahnya masing-masing, dari 4 Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Palangka yang memiliki wilayah paling kecil dengan luas wilayah hanya 24,75 Km². Dan Kelurahan Bukit Tunggul yang memiliki luas wilayah paling besar dengan luas wilayah 237. 12 Km².

Secara geografis Kecamatan Jekan Raya yang terletak di bagian barat Kota Palangka Raya yang sekaligus membawahi 4 kelurahan serta berbatasan langsung dengan Kabupaten lain dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Di sebelah utara kecamatan Jekan Raya berbatasan dengan Bukit Rawi atau Kabupaten Pulang Pisau.
- 2) Di sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tumbang Rungan kecamatan Pahandut.
- 3) Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Katingan.
- 4) Dan di sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Kereng Bangkirai kecamatan Sebangau.⁷⁵

⁷⁵*Ibid.*

b. Visi dan Misi Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya mempunyai visi, adapun visinya sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan misi kecamatan Jekan Raya dimuat dalam sebuah rumusan demi mencapai visi yang telah ditentukan, dengan demikian kecamatan Jekan Raya memiliki beberapa misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik.
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
- 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran.
- 5) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat.

c. Jumlah Penduduk di Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya merupakan kecamatan terbesar setelah kecamatan Pahandut yang ada di Kota Palangka Raya dan memiliki jumlah penduduk sekitar 126. 993 jiwa yang terbesar di 4 kelurahan.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah
dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Jekan Raya dirinci Per
Kelurahan**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²)
1.	Menteng	41.448	31.00	1337,03
2.	Palangka	45.628	24,75	1 845,74
3.	Bukit Tunggal	37.491	237,12	158, 11
4.	Petuk Ketimpun	2.372	59,75	39,70
Kecamatan Jekan Raya		126.993	352, 62	360, 14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya (diolah kembali)

Kecamatan Jekan Raya dirinci berdasarkan jenis kelamin memiliki jumlah penduduk 126.993 yang terdiri dari 64.760 laki-laki, dan 62.223 perempuan yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya
Menurut Jenis Kelamin**

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Menteng	21.170	20.287	41.448
2.	Palangka	23.271	22.411	45.628
3.	Bukit Tunggal	19.183	18.308	37.491
4.	Petuk Katimpun	1.136	1.236	2.372
Kecamatan Jekan Raya		64.760	62.233	126.993

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya (diolah kembali)

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013

No.	Agama	Kelurahan				Jumlah
		Menteng	Palangka	Bukit Tunggal	Petuk Katimpun	
1.	Kristen	20.460	22.041	15.185	563	58.246
2.	Katolik	987	1.954	1.309	30	4.780
3.	Islam	32.197	35.159	38.135	2.635	108.126
4.	Budha	60	117	102	5	284
5.	Hindu	1.304	1.039	834	39	3.216
Jumlah		55.008	60.310	56.062	3.273	174.653

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya (diolah kembali)

**Tabel 2.4 Jumlah Tempat Ibadah
Di Kecamatan Jekan Raya**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	60
2.	Langgar	109
3.	Gereja Protestan	67
4.	Gereja Katolik	3
5.	Pura	-
6.	Wihara	1
7.	Balai	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya (diolah kembali)

2. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya

Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kota Palangka Raya adalah lembaga penerima, pengelola dan penyalur dana zakat, infak dan sedekah di wilayah Kota Palangka Raya, yang mulai berdiri sejak tahun 1984. Atas keputusan Menteri Agama Nomor 581, dan kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2000, yang isinya tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang selanjutnya berdasarkan hal ini keluar Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 469 Tahun 2000 tentang Pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, maka BAZIS tingkat Kota Palangka Raya pun kemudian dibentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kepengurusan BAZIS ini sudah berganti tiga periode, yaitu periode 2000-2003, 2003-2006, dan 2007 hingga sekarang, dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2007 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya masa bakti 2007-2010.⁷⁶

Zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kota Palangka Raya dikelola oleh Badan ini secara transparan dengan menggunakan manajemen moderen, dan dipublikasikan kepada masyarakat Kota Palangka Raya, sesuai dengan visi yang dimiliki Badan ini, yakni “

⁷⁶Rahmaniar, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya)”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume V, Nomor 1, Juni 2008, h. 14-15

Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, amanah, transparan, akuntabel sesuai dengan manajemen modern dan tuntunan agama Islam.”

Adapun yang dimaksud dengan profesional adalah kemampuan yang berpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreatif, dan inovatif. Amanah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan BAZ Palangka Raya prinsip ini harus jadi pijakan yang utama karena mengandung sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh lembaganya. Amanah merupakan syarat mutlak yang dimiliki oleh pengurus. Sedangkan transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat maka dapat diciptakan sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern saja tapi juga pihak ekstern.

a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

Adapun visi dari Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya yaitu :

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, amanah, transparan, akuntabel sesuai dengan manajemen modern dan tuntunan agama Islam.”

Sesuai dengan visi yang disebutkan di atas, maka Badan ini mengemban misi sebagai berikut :

- 1) Membangun kesadaran umat Islam Kota Palangka Raya dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- 2) Memberikan pelayanan kepada muzakki guna mempermudah berzakat.
- 3) Membangun lembaga dan pengelolaan ZIS yang profesional dan amanah sesuai dengan manajemen modern.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mendorong agar mereka dapat menjadi muzakki.⁷⁷

b. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya

Badan Amil Zakat Palangka Raya mempunyai tugas yang pokok, adapun tugas pokok yang berfungsi yaitu :

- 1) Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat termasuk pegawai.
- 2) Menyalurkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Memberi penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan hasil pengumpulan zakat.
- 4) Membina pemanfaatan pendayagunaan ZIS agar lebih produktif dan terarah.
- 5) Koordinasi, bimbingan, dan pengawasan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.

⁷⁷*Ibid...* h. 15-16

- 6) Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- 7) Pengurusan dan ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan kantor.⁷⁸

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Disini peneliti akan memaparkan secara lebih rinci permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, perspektif pengusaha Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kesadaran pengusaha Muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah, pengusaha yang beragama Islam, pengusaha mempunyai pendapatan usaha berkisar ± 10 hingga 50 juta perbulan, usaha yang dijalankan telah 5 tahun berdiri, dan memiliki usaha yang menghasilkan barang maupun jasa. Hal ini menjadi kriteria subjek yang mana peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan ada 5 orang pengusaha Muslim sebagai subjek penelitian yang terdiri dari ,1 orang memiliki usaha kontraktor, 1 orang memiliki usaha dibidang jasa yaitu EO (*Event Organizer*), 1 orang memiliki usaha kuliner, 1 orang usaha makanan oleh-oleh khas Kalimantan Tengah, dan 1 orang usaha konsultan IT

⁷⁸*Ibid...* h. 16-17

(Informasi dan Teknologi). Ditambah dengan 5 informan tambahan sebagai data penunjang atau data sekunder. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Umur	Pendapatan Usaha	Usaha	Tahun Berdirinya Usaha
1.	HH	36 Tahun	30 juta/bulan	EO (Event Organizer)	2000
2.	P	26 Tahun	15 juta/hari	Makanan kuliner	2013
3.	AW	42 Tahun	7 juta/bulan	Makanan Abon	2012
4.	AWK	34 Tahun	83 juta/bulan	Konstruksi	2010
5.	AH	29 Tahun	9,5 juta/pesanan	Konsultan IT dan travel	2011

Sumber : Diolah peneliti

Tabel 2.6 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir
1.	AA	Palangka Raya, 20 Februari 1991
2.	DP	Jakarta, 17 September 1996
3.	S	Runggu Raya, 09 September 1995
4.	RAS	Palangka Raya, 18 Januari 1994
5.	A	Kapuas, 4 Juli 1992

Sumber : Diolah Peneliti

C. Analisis Data

Pada subbagian ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian yaitu perspektif pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adapun analisis dari penelitian ini yaitu:

1. Perspektif Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya

a. Pola Pembayaran Zakat di Kota Palangka Raya

Telah dijelaskan pada BAB II deskripsi teoritik mengenai jenis-jenis zakat, zakat ada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu⁷⁹

Pola pembayaran zakat seperti dijelaskan di atas merupakan pola pembayaran yang lazim untuk diikuti karena telah disepakati oleh ijtihad para ulama maupun ketentuan yang ditetapkan di dalam hadis. Ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berlaku untuk setiap umat Islam, tidak memandang status sosial asalkan seorang *muzakki* mampu

⁷⁹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*.... h. 24-25

dalam membayar zakatnya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dan masih mampu untuk mencari nafkah atau bekerja.

Begitu juga halnya masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya, mengeluarkan zakat fitrahnya kepada masjid-masjid atau langsung memberikan kepada yang berhak menerimanya, sebelum dilaksanakannya shalat id. Sedangkan zakat *mal* diberikan kepada orang terdekat atau memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu disekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada masyarakat, seperti pengusaha dalam pembayaran zakat dilakukan dengan cara pengumpulan dana zakat melalui kerjasama antara pekerja dan pemilik usaha untuk menyisakan keuntungan yang diperoleh khusus untuk pembayaran zakat. Pengumpulan dana zakat tersebut dilakukan dengan cara pemotongan gaji untuk pekerjanya, tetapi pemotongan gaji tersebut telah disepakati bersama sebelum diadakannya pemotongan gaji. Pembayaran zakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari zakat yang harus dikeluarkan, tidak semena-mena melakukan pemotongan gaji hanya untuk kepentingan pribadi.

Adapun pengusaha yang melakukan pembayaran zakat dilakukan secara individu tanpa adanya pemotongan gaji, disebabkan pekerja atau karyawan merasa keberatan dan terbebani akan adanya hal ini. Jadi pembayaran zakat dilakukan secara perindividu dan ditanggung

oleh masing-masing pihak. Berkaitan mengenai pola pembayaran zakat yang dilakukan pengusaha Muslim akan dipaparkan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan: “bagaimana pembayaran zakat yang dilakukan oleh Anda atau ada pemotongan gaji karyawan khusus untuk pembayaran zakat?

Penuturan Bapak HH (Subjek 1)

“Membayar zakat itu sudah menjadi kewajiban, karena ada sebagian rizki buat orang lain, Adanya ketentuan pembayaran itu sendiri udah ada ketentuannya jadi kita tinggal ngitung aja, kan kewajibannya 2,5%. kalo pemotongan gaji ga da saya ga makai sistem gaji, adanya sistem *fee* yang saya lakukan.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek Bapak HH menyatakan dalam membayar zakat adalah kewajiban, melalui zakat bisa berbagi rezeki dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Zakat yang dikeluarkan oleh Bapak HH sebesar 2,5% yang mana telah ditentukan di *al-Qur’ān* maupun hadis mengenai pengeluaran zakat. Sistem penggajian yang dilakukan oleh Bapak HH menggunakan sistem *fee* dan pemotongan *fee* tidak dilakukan, disebabkan dalam membayarkan zakat dilakukan oleh setiap individu karyawan.

Penuturan Saudara P (Subjek 2)

“Pembayaran zakat itu disini adanya pemotongan gaji karyawan untuk zakat dan infak, nah antara infak dan zakat kami pisah ga dijadikan satu karena kan penyalurannya berbeda jadi kami pisahkan.”⁸¹

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak HH pada hari Kamis 09 Maret 2017

⁸¹Hasil wawancara dengan Saudara P pada Hari Rabu 08 Maret 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas subjek P menyatakan dari ketentuan pembayaran zakat yang harus dikeluarkan sudah memahaminya. Menurut penuturan P dalam membayar pajak dan zakat sudah dilakukan sesuai dengan pendapatan dari usaha, serta dari pendapatan usaha tersebut sudah diatur keuangannya sehingga dua kewajiban tersebut bisa ditunaikan tanpa adanya kendala dalam mengeluarkannya.

Penuturan Ibu AW (Subjek 3)

“Kalo aku untuk zakat sudah ku sisihkan 5% ku keluarkan zakatnya yang wajib aja yang setahun sekali, kalo yang perbulan melalui infak. dan ga da pemotongan gaji, tempat ku make sistem bagi hasil dengan karyawan.”⁸²

Pembayaran zakat yang dilakukan Ibu AW sudah mempunyai niatan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya sebesar 5% untuk orang yang membutuhkan. Melalui infak mengeluarkan sebagian hartanya setiap bulannya sesuai dengan keuntungan yang didapat, sistem gaji yang dilakukan menggunakan bagi hasil dengan karyawan dan tidak adanya pemotongan bagi hasil tersebut untuk membayar zakat, karena pembayaran zakat dilakukan secara individu tanpa adanya pemotongan khusus untuk membayar zakat.

Penuturan Saudara AWK (Subjek 4)

“Untuk zakat sesuai dengan ketentuan dari al-qur’an dan hadis yang mana zakat itu kan hukum dari Allah beda dengan pajak, pajak tu kan dari manusia yang buat, karena zakat itu kewajiban ya

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu AW pada Hari Kamis 30 Maret 2017

dikeluarkan karena sebagai Muslim yang taat pada agama. Pemotongan gaji ga ada bayarnya individu aja.”⁸³

AWK memahami penhitungannya karena sudah tertera di dalam *al-Qur’ān* maupun dari hadis mengenai ketentuan dikeluarkannya zakat, yang mana AWK menyatakan hukum zakat itu merupakan ketentuan dari Allah yang sudah jelas peruntukannya. Sebagai Muslim yang taat dengan agama maka zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. Pembayaran zakat yang dilakukan secara individu, tidak ada pemotongan gaji secara khusus untuk membayar zakat.

Penuturan Saudara AH (Subjek 5)

“zakat Insya Allah selalu disisakan untuk orang-orang yang berhak dari keuntungan yang didapat, soal pemotongan gaji untuk karyawan ga ada zakat membayarnya individu kalo ditempat saya.”⁸⁴

Berdasarkan wawancara dari Saudara AH menyatakan memahami zakat yang harus dibayarkan, karena setiap keuntungan yang didapat disisakan untuk orang-orang yang berhak. Sedangkan pemotongan gaji secara khusus untuk membayar zakat tidak dilakukan karena pembayaran zakat dibayar secara individu.

Begitu pula pernyataan dari para informan penelitian sebagai karyawan dari pengusaha yang peneliti wawancarai, sebagai data pelengkap untuk menguji pernyataan dari para pengusaha, maka

⁸³ Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Saudara AH pada Hari Kamis 07 April 2017

peneliti melakukan wawancara kepada para karyawannya. “apakah ada pemotongan gaji secara khusus untuk pembayaran zakat?”

Informan DP merupakan salah satu karyawan Saudara P, yang bekerja dibagian keuangan dirumah makan tersebut. pada usia yang relatif muda DP memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa meminta dari orang tuanya. Berikut jawaban dari Saudara DP mengenai ada, tidaknya pemotongan gaji untuk zakat :

“Ada pemotongan gaji untuk zakat gaji pokok dipotong 0,25% dari gaji karyawan, setiap bulan juga ngasih ke panti-panti kadang kami yang ngundang anak panti asuhan kesini. Pemotongan gaji dilakukan setiap 1 bulan untuk zakat dan itu atas persetujuan dari semua karyawan jadi ga keberatan sih dipotong gajinya.”⁸⁵

Maksud pernyataan DP adalah pemotongan gaji dilakukan setiap 1 bulan untuk zakat, pemotongan gaji tersebut disetujui oleh karyawan sehinggalah gaji yang pokok dipotong sebesar 0,25% dari gaji karyawan. Setiap 1 bulan juga mengundang anak-anak panti asuhan untuk menikmati makanan dari rumah makan ini, dan bisa juga memberikan ke panti asuhan.

Informan yang berinisial S merupakan karyawan dari Ibu AW yang mana S sudah lama bekerja dari tahun berdirinya usaha Ibu AW sampai sekarang, dengan menamatkan sekolah sampai jenjang sekolah menengah. Berikut jawaban dari Saudari S mengenai ada, tidaknya pemotongan gaji untuk zakat :

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Saudara DP pada Hari Selasa 14 Maret 2017

“ga ada pemotongan gaji, disini sistemnya bagi hasil untuk gaji, zakat kan bayarnya masing-masing.”⁸⁶

Maksud pernyataan S bahwasannya pemotongan gaji tidak dilakukan untuk pembayaran zakat dan pajak, karena sistem gajinya bagi hasil. Pembayaran pajak dan disiapkan dari pemilik usaha untuk membayarnya, dan menunaikan zakat secara individu ditunaikan.

Informan yang berinisial AA merupakan karyawan dari Bapak HH, saudara AA bekerja dengan Bapak HH sejak dibangku perkuliahan sampai dengan sekarang. Pekerjaan yang digelutinya dapat bertahan lama dan tidak menjadi seorang pengangguran sehingga karya-karyanya dapat dihargai sesuai dengan pekerjaannya. Walaupun harus merelakan tugas akhir dari perkuliahannya terbengkalai, karena terlalu menikmati dunia pekerjaan. Berikut jawaban dari Saudara AA mengenai ada, tidaknya pemotongan gaji untuk zakat :

“ditempat kerja kami ga makai sistem gaji tapi *fee*, untuk zakatnya ga da pemotongan *fee* kan zakatnya individu.”⁸⁷

Maksud dari informan berinisial AA ditempat kerja saudara AA tidak menggunakan sistem gaji melainkan *fee* yang digunakan, pembayaran zakat yang dilakukan ditempat kerjanya tidak ada pemotongan *fee* karena zakat ditunaikan secara individu.

Informan berinisial RAS merupakan karyawan dari Saudara AWK, selain bekerja RAS juga masih mengerjakan tugas akhir dari

⁸⁶Hasil wawancara dengan Saudari S pada Hari Kamis 30 Maret 2017

⁸⁷Hasil wawancara dengan Saudara AA pada Hari Jum'at 21 April 2017

perkuliahannya. Agar waktu yang digunakan tidak terbuang sia-sia, maka saat ini Saudara RAS memfokuskan dirinya pada pekerjaan yang sedang dijalankan. Berikut jawaban dari Saudara RAS mengenai ada, tidaknya pemotongan gaji untuk zakat :

“kalo untuk zakat bos kadang ngasih zakatnya ke orang-orang yang dikenal sama beliau, ga da pemotongan gaji bayarnya individu aja.”⁸⁸

Maksud dari pernyataan RAS tidak ada pemotongan gaji untuk pembayaran zakat, untuk zakat pimpinannya memberikan zakat kepada orang-orang yang dikenalnya yang masih membutuhkan bantuan materil.

Informan yang berinisial A merupakan karyawan dari Saudara AH, A sudah mulai bekerja belum terlalu lama dengan Saudara AH sekitar 2 bulan berjalan. Selama bekerja Saudara A juga sedang menempuh tugas akhir dari perkuliahannya yang telah lama tertunda dikerjakan, karena sudah menikmati dunia pekerjaan yang mampu mendapatkan penghasilan sendiri sehingga melupakan kewajiban perkuliahan yang harus dituntaskan. Berikut jawaban dari Saudara A mengenai ada, tidaknya pemotongan gaji untuk zakat :

“untuk bayar zakat ga ada pemotongan gaji selama kami bekerja dengan bang AH, dan zakatnya bayar sendiri-sendiri.”⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Saudara RAS pada Hari Rabu, 19 April 2017

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Saudara A pada Hari Kamis, 20 April 2017

Maksud dari pernyataan A untuk pembayaran zakat tidak melakukan pemotongan gaji ketika bekerja dengan Saudara AH, zakat dibayarkan oleh masing-masing karyawan secara individu.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada 5 pengusaha yaitu Bapak HH, Saudara P, Ibu AW, Saudara AWK dan Saudara AH dan 5 informan penelitian yaitu DP, S, AA, RAS, dan A merupakan bentuk dari pola pembayaran masing-masing pengusaha, meskipun terdapat pola pembayaran yang berbeda-beda pengusaha tersebut membayarkan zakatnya sesuai dengan *al-Qur'ān* dan hadis yaitu 2,5% dari keuntungan yang dihasilkan. Setiap orang mempunyai cara untuk memahami sesuatu yang penting bagi dirinya, bahkan mempunyai prinsip mengenai hal tersebut.

Adapun pengusaha yang melakukan pemotongan gaji kepada karyawannya mempunyai tujuan agar keuntungan yang didapat menjadi berkah dan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu. Pemotongan gaji yang dikeluarkan untuk zakat sesuai dengan ketentuan yaitu 2,5% dari keuntungan yang mana antara pengusaha dan karyawan menyepakati ada pemotongan gaji tersebut.

Seperti teori yang dipaparkan di BAB II deskripsi teoritik mengenai *maqāsid asy-syarī'ah*, bahwasannya pemotongan gaji tersebut bermaksud agar mencapai kemaslahatan, kebaikan, ketentraman, dan kesejahteraan. Adapun masalah adalah kemanfaatan

atau kebaikan, yang di mana dengan pemotongan gaji untuk zakat membuka pemahaman bagi karyawannya mengenai ketentuan zakat, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Tindakan yang dilakukan oleh Saudara P melakukan pemotongan gaji kepada karyawannya, mempunyai tujuan untuk menebarkan kebaikan dan tidak hanya memahami tentang zakat tetapi Perspektif tersebut disertai dengan tindakan yang benar-benar sesuai dengan syariat, dan tindakan tersebut tidak menzalimi karyawannya.

Tujuan asasi zakat adalah mengurangi dan memperkecil jurang pemisah antara miskin dan kaya, guna melenyapkan ketegangan-ketegangan sosial, di dalam menciptakan pembangunan hidup yang serasi dan selaras dalam lingkungan masyarakat.⁹⁰

b. Muzakki dikalangan Pengusaha di Kecamatan Jekan Raya

Muzakki dapat disebut juga sebagai wajib zakat. *Muzakki* menurut kesepakatan ulama ialah seseorang yang memenuhi syarat yaitu merdeka, beragama Islam, baligh dan berakal, dan memiliki harta yang wajib dizakati.⁹¹Peneliti menemukan *muzakki* sejumlah 5 orang yang menjadi subjek penelitian, berikut *muzakki* dikalangan pengusaha Muslim adalah sebagai berikut :

⁹⁰Nasaruddin Umar, *40 Seni Hidup Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Quran, As-Sunnah dan Salafush Shaalih*, Semarang, Pesantren Karya & Wirausaha Basmala Indonesia, 2005. h. 123

⁹¹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia...* h. 38

1) Bapak HH (Subjek 1)

Bapak HH adalah seorang pengusaha yang terbilang pengusaha sukses karena penghasilan yang diperoleh melebihi pendapatan UMP (Upah Minimum Provinsi). Usaha yang digeluti yaitu usaha dibidang jasa *Event organizer* (EO) yang mana jasa ini dibutuhkan apabila ada *event-event* yang besar. Pada usia 36 tahun masih mampu bersaing dengan usaha-usaha dibidang lain. Alamat rumah yang terletak di jalan G.Obos 18 komplek rukun no. 2.

Disamping sebagai seorang pengusaha Bapak HH juga seorang politisi yang aktif disalah satu pengusung partai. Usaha yang dijalankan adalah usaha yang bergerak dibidang jasa, dan usaha tersebut sudah berjalan selama 17 tahun lamanya.

2) Saudara P (Subjek 2)

Saudara P adalah manajer dari salah satu rumah makan di jalan g.obos induk sebelah SPBU pertamina. Sebagai seorang manajer P mengatur semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. P dulunya adalah karyawan dari rumah makan tersebut, karena keuletannya dalam bekerja saudara P diangkat menjadi seorang manajer diusianya yang relatif masih muda yaitu 26 tahun, yang bertempat tinggal di jalan Riau.

Usaha ini tergolong usaha kuliner yang sudah besar karena penjualannya telah sampai ke Negara Asia seperti Malaysia, Arab

Saudi hingga memiliki cabang diseluruh Indonesia. Setiap harinya tidak pernah terlihat sepi dan ramai dikunjungi oleh para konsumen yang ingin menikmati hidangan khas dari Surabaya ini.

3) Ibu AW (Subjek 3)

Ibu AW adalah seorang pengusaha berumur 42 tahun, rumah yang saat ini ditempati berada di jalan merak no.4. Pengusaha yang memanfaatkan kekayaan alam Pulau Kalimantan, usaha makanan abon ini merupakan makanan khas dari Kalimantan Tengah yang menggunakan bahan utamanya yaitu ikan, dengan ikan ini bisa dijadikan sebagai komposisi dari abon yang dibuatnya.

Beraneka macam jenis abon yang diproduksi, mulai dari abon ikan patin dan abon ikan haruan, ada juga jenis makanan yang diproduksi yaitu nasi bakar kandas sarai, dan tahu memendam rasa. Produk yang paling besar omzetnya adalah makanan abon, usaha yang dijalankan selama 5 tahun ini penjualannya mampu tersebar luas sampai daerah Sampit hingga melakukan strategi penjualan secara online dengan menggunakan media sosial seperti, instagram, dan *facebook*. Penjualan menggunakan media sosial akan lebih mudah dan mempercepat penjualan makanan abon.

4) Saudara AWK (Subjek 4)

Saudara AWK adalah pengusaha dibidang jasa yaitu kontraktor, usaha ini dijalankan sudah 8 tahun berjalan. Menginjak

usia 34 tahun masih mampu bersaing dengan kontraktor yang lainnya, rumah yang ditempati di jalan Tjilik Riwut km. 7.

Selain menjadi pengusaha AWK dulunya adalah seorang yang aktif diorganisasi mahasiswa seperti BEM, HMI, dan KMPI. Usaha jasa ini diperlukan apabila ada proyek pembangunan yang membutuhkan jasanya untuk mengerjakan proyek tersebut. AWK termasuk pengusaha yang sukses karena bisa memperkerjakan orang yang membutuhkan pekerjaan agar mengurangi angka pengangguran dimasyarakat.

5) Saudara AH (Subjek 5)

Saudara AH mempunyai usaha jasa dibidang IT, usaha ini dijalankan sudah 7 tahun berjalan. Saudara AH merupakan orang perantauan dari Kapuas untuk mencari penghasilan dengan cara yang kreatif, dan sekarang bertempat tinggal di jalan Rta. Milono km. 5. Usia yang relatif masih muda yaitu 29 tahun AH merupakan konsultan IT yang mana jasanya diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah untuk menjalankan suatu program dari komputer.

Selain sebagai konsultan IT AH memiliki usaha travel yang dijalankan beiringan ketika AH sebagai konsultan IT, AH termasuk pengusaha muda yang sukses, dimana pada usianya tersebut AH sudah mempunyai beberapa usaha dibidang jasa. AH juga sempat

menjalani usaha kavling tanah, tetapi usaha tersebut kurang digelutinya.

c. Perspektif Pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penjelasan mengenai perspektif telah dijelaskan pada BAB II deskripsi teoritik, mengenai konsep perspektif. Perspektif merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu fenomena yang terjadi. Berbicara mengenai perspektif pengusaha Muslim mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan dipaparkan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan. “Apakah Anda memahami mengenai adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?”

Penuturan Bapak HH (Subjek 1)

“Mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu udh lama tau, Saya walaupun tau tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetep aja saya bayar zakat dan bayar pajak juga, jadi saya ga mengikuti program yang dibuat pemerintah ini.”⁹²

Berdasarkan pernyataan dari Bapak HH mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengetahui sejak lama, meskipun Bapak HH mengetahui adanya hal ini, Bapak HH membayarkan zakat dan pajak secara terpisah dan tidak mengikuti program ini lebih lanjut.

⁹²Hasil wawancara dengan Bapak HH pada Hari Kamis 09 Maret 2017

Penuturan Saudara P (Subjek 2)

adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kurang tau ya, soalnya disini bayar zakat sama bayar pajak juga.”⁹³

Menurut penuturan P mengenai kebijakan pemerintah adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum diberlakukan kepada masyarakat khususnya bagi orang-orang yang mempunyai usaha.

Penuturan Ibu AW (Subjek 3)

“Yang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum pernah dengar dan belum pernah juga diajak sosialisasi tentang ini makanya ga tau. Kalo yang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, apanya yang dikurangi pajak penghasilan aja atau pajak semuanya.”⁹⁴

Pernyataan dari Ibu AW mengungkapkan bahwasannya mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak AW belum pernah diajak untuk mengikuti sosialisasi perihal ini, oleh karena itu Ibu AW tidak mengetahui adanya kebijakan pemerintah mengenai hal ini.

Penuturan Saudara AWK (Subjek 4)

“ga pernah denger ada zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, ga pengaruh juga adanya itu selama ini saya bayar zakat sama pajak seperti biasa.”⁹⁵

Pernyataan dari Saudara AWK bahwasannya informasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak dipublikasikan kepada para pengusaha sehingga saudara AWK tidak mengetahui adanya kebijakan dari pemerintah. Pembayaran zakat dan pajak dibayar seperti

⁹³ Hasil wawancara dengan Saudara P pada Hari Rabu 08 Maret 2017

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu AW pada Hari Kamis 30 Maret 2017

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

biasa secara terpisah. Apabila zakat sebagai pengurang penghasilan diberlakukan tidak mempengaruhi apapun.

Penuturan Saudara AH (Subjek 5)

“zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak udah lama tau teorinya, cukup tau aja ga tau-tau banget. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak seperti CSR juga hampir mirip, yang diperusahaan asing mereka bilanganya CSR soalnya ga tau zakat diganti CSR, kalo perusahaan yang pake CSR pajak penghasilan bisa dikurangi.”⁹⁶

Pernyataan dari Saudara AH mengenai kebijakan pemerintah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dari teori sudah mengetahuinya tetapi hanya sekedarnya tidak terlalu mempelajarinya secara mendalam. Menurut Saudara AH zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sama hal nya dengan program perusahaan-perusahaan asing yang non Muslim disebabkan orang non Muslim tidak mengetahui zakat sehingga program CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut yang mereka lakukan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak terlalu populer dikalangan pengusaha.

Perspektif pengusaha terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adanya ketidak selarasan dalam memahami program dari BAZNAS, sebagian pengusaha ada yang memahami hal

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Saudara AH pada Hari Kamis 07 April 2017

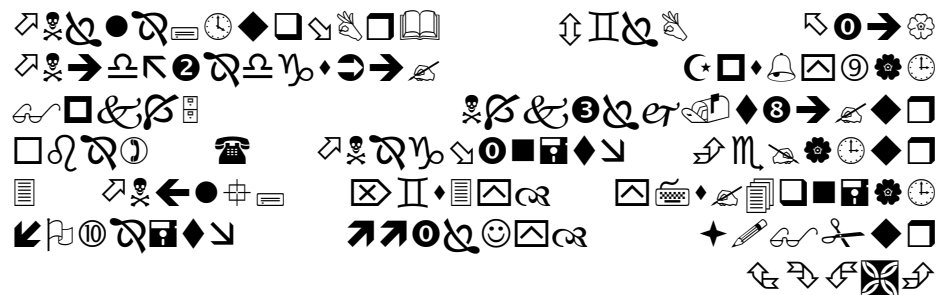
tersebut tetapi hanya sekedar mengetahui tidak diaplikasikan dalam melaksanakan pembayaran zakat dan pajak.

Pengusaha yang memahami adanya hal ini mengungkapkan ketidak jelasan dan tidak adanya ketegasan jika zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut diberlakukan di Kota Palangka Raya, sertasimpang siur informasi yang didapat sehingga membuat pengusaha ini tetap melakukan pembayaran zakat dan pajak secara terpisah tanpa adanya pengurangan pajak penghasilan. Menurut para pengusaha tersebut tidak ada pengaruhnya apabila yang dikurangi hanya pajak penghasilan, sedangkan usaha yang dijalankan ada beberapa pajak yang harus dibayar, sehingga para pengusaha ini terkena beban pajaknya *double*.

Menurut hemat peneliti Perspektif pengusaha ini berbeda-beda tergantung bagaimana setiap individu dalam menyikapi hal ini, asumsi dari pengusaha yang dikemukakan di atas bahwasannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat atau pengusaha secara gamblang, hanya diinformasikan melalui undang-undang baik zakat maupun pajak.

Adanya kemungkinan yang terjadi dalam hal ini adalah, pengusaha kurang membaca berita ataupun informasi mengenai tata cara pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS berupa undang-undang, adanya ketidak ingin tahuan mengenai pembayaran zakat yang

kontemporer, dan meyakini ketika memberikan harta yang lebih dan dikeluarkan untuk hal-hal yang baik yang membawa kemaslahatan akan digantikan hartanya serta dilipat gandakan pahalanya. Seperti dasar hukum zakat yang berada pada BAB II deskripsi teoritik dengan firman Allah QS. At-Taubah 9 :103



Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 9 : 103)

Perspektif pengusaha mengenai zakat secara umum telah memahaminya, seperti ayat yang dijelaskan di atas bahwasannya dengan zakat harta menjadi berkah, dan memberikan makna tersendiri di kehidupan sosial. Bahkan hasil keuntungan yang didapat lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, hasil dari keuntungan tersebut memberikan manfaat untuk orang sekitarnya.

2. Kesadaran Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

a. Sistem Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Palangka Raya

Sistem menurut Pamudji sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan, atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.⁹⁷

Sesuai dengan sub judul di atas mengenai sistem pembayaran bahwasannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan program yang mampu mengajak umat Islam agar memanfaatkan program ini secara perlahan-lahan, meskipun ada kendala mengenai kelancaran adanya program ini. Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak hanya untuk wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, tetapi juga berlaku untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam

⁹⁷ Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Erlangga, 2006. h. 154

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga perusahaan yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, dapat memanfaatkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan yang pemiliknya beragama Islam.

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan program dari pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai tolak ukur para *muzakki* agar tidak segan dalam membayar zakat. Kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya di Kota Palangka Raya, sistem pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terealisasi kepada masyarakat, disebabkan tidak adanya sistem yang terhubung antara BAZNAS dan Kantor Perpajakan. Seperti pernyataan salah satu *staff* pegawai yang bekerja di BAZNAS, ketika peneliti bersilaturahmi ke kantor BAZNAS Provinsi yang terletak di *basement* Masjid Raya Darussalam menuturkan:

“Sistem pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempunyai persoalan agar sistem tersebut diterapkan di Kota Palangka Raya, disebabkan mayoritas dari masyarakat Kota Palangka Raya ini membayarkan zakatnya tidak dilembaga yang telah dibuat oleh pemerintah, tetapi lebih memilih membayarkan zakatnya kepada orang yang berhak secara langsung.”⁹⁸

Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, bahwasannya sistem ini mampu dilakukan apabila *muzakki* tersebut

⁹⁸Hasil dari wawancara dengan *staff* pegawai yang berada di Kantor BAZNAS Provinsi pada Hari Senin 27 Februari 2017

membayarkan zakatnya kepada BAZNAS, sehingga sistem ini dapat diberlakukan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian, dari pengusaha Muslim yang peneliti wawancarai yaitu Bapak HH, P, Ibu AW, AWK, dan AH mayoritas membayar zakat dan membayar pajak. Berkaitan dengan sistem pembayaran zakat dan pajak pengusaha akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan. “Apakah dalam menunaikan zakat dan membayar pajak ini dipenuhi dengan kesadaran atau karena paksaan dan apa saja pajak yang dibayar?”

Penuturan Bapak HH (Subjek 1)

“Mengenai kesadaran kita memahami kewajiban kita, dan pajak adalah kesadaran kita untuk membayarnya. Membayar zakat itu sudah menjadi kewajiban, karena ada sebagian rizki buat orang lain, mengenai pajak sebagai warga Negara yang baik apalagi kita sebagai warga Muslim Indonesia, seharusnya kita sadar untuk membayarnya agar bisa membangun masyarakat ke depannya. Untuk bayar pajak, pembayaran pajak penghasilannya udh tiap tahun bayar sesuai dengan SPT masa tergantung dari klien dan SPT tahunan dari penghasilan yang kita peroleh.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek Bapak HH menyatakan dalam membayar zakat dan pajak adalah kewajiban, melalui zakat bisa berbagi rezeki dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya mempunyai kesadaran untuk membayarnya sekaligus untuk membangun masyarakat agar menjadi

⁹⁹Hasil wawancara dengan Bapak HH pada Hari Kamis 09 Maret 2017

warga Negara yang lebih baik lagi ke depannya. Pembayaran pajak penghasilan yang dibayar oleh Bapak HH sudah dikeluarkan setiap tahunnya sesuai ketentuan dari pemerintah dan juga disesuaikan dengan usaha yang dijalankan.

Penuturan Saudara P (Subjek 2)

“Untuk membayar zakat dan pajak itu udah menjadi kewajiban, tidak ada istilah paksaan dalam membayarnya apalagi zakat kita kan Muslim harus dikeluarkan zakatnya entah itu zakat fitrah atau zakat mal harus dikeluarin. pembayaran pajaknya dari pemerintah ada pajak harian 10%, usaha kami kan dikenakan beberapa pajak, ada yang namanya pajak IMB pertahun, pajak NPWP, dan pajak Disperinda dari pemerintah udah ada ketentuannya masing-masing.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek P menyatakan zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan sebagai seorang Muslim, dan tidak ada paksaan dalam membayarnya karena dua hal ini sama-sama mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai sifat yang wajib, dari zakat fitrah maupun zakat *mal* harus dikeluarkan karena adanya kewajiban untuk mengeluarkannya. Menurut penuturan P dalam membayar pajak dan zakat sudah dilakukan sesuai dengan pendapatan dari usaha, serta dari pendapatan usaha tersebut sudah diatur keuangannya sehingga dua kewajiban tersebut bisa ditunaikan tanpa adanya kendala dalam mengeluarkannya.

Penuturan Ibu AW (Subjek 3)

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Saudara P pada Hari Rabu 08 Maret 2017

“Paksaan tidak ada, dari kesadaran sendiri karena kalo belum bayar pajak terutama lah suka menyita pikiran dan kepikir terus belum bayarnya, karena disuruh jugadengan disperindag membuat tanda daftar industri, mau tidak mau harus membuat NPWP. Karena didesak seperti itu membuat kami bayar pajak, jadi lain kesadaran murni juga didesak seperti itu. Bukannya kami ga mau bayar pajak tapi terkadang penjualan ga tetap, pendapatan ga tentu pertahunnya itu agak sedikit terbebani lah karena penjualan sama keuntungan ga sama. Kalo zakat udah disisihkan dan udah diniatin jadi harus ditunaikan niatannya.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek Ibu AW menyatakan kesadaran untuk membayar pajak berasal dari diri sendiri untuk membayarnya, dan adanya desakan yang membuat Ibu AW untuk membayar pajak karena apabila pajak belum dibayarkan menjadi beban pikiran. AW dalam membayar pajaknya masih terkendala oleh pendapatan yang tidak menentu sehingga pembayaran pajak pertahun agak sedikit tersendat, dari penjualan yang diproduksi dengan keuntungan tidak sama. Zakat yang ditunaikan oleh Ibu AW merupakan niatan yang harus ditunaikan, dan disisihkan dari keuntungan tersebut untuk menunaikan zakat.

Penuturan Saudara AWK (Subjek 4)

“Pajak itu dibayar karena keterpaksaan karena kami pengusaha harus membayar pajak penghasilan, PPn juga jadi double gitu bayarannya ya memang peraturan tentang pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi terkadang usaha kami ni kan tergantung dari panggilan aja, maksudnya kalo ada yang membutuhkan tenaga kami baru kami bekerja itupun tidak setiap hari mendapatkan proyek pembangunan, harus menunggu dulu baru ada kerjaan. Itu sih yang membuat terpaksa kami membayarnya dan juga karena

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu AW pada Hari Kamis 30 Maret 2017

pajak dirasa tidak adil, soalnya orang-orang yang kurang mampu harus membayarnya juga dan peruntukannya pun belum jelas. Kalo zakat sudah kewajiban sebagai seorang Muslim dan peruntukannya tu jelas kepada siapa dan untuk siapa, kan sudah dijelaskan di dalam al-qur'an mengenai peruntukannya tersebut, sedangkan pajak didalam peraturannya tidak dicantumkan peruntukannya kepada siapa.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek AWK menyatakan bahwa kesadaran untuk membayar pajak karena adanya keterpaksaan karena usaha yang dijalankan oleh AWK ini terkadang tidak setiap hari berjalan, sesuai dengan panggilan dari orang yang membutuhkan jasanya untuk membangun sebuah proyek.

Menurut AWK yang membuat bayar pajak menjadi sebuah keterpaksaan disebabkan oleh peruntukkan pajak yang tidak jelas alurnya diberikan kepada siapa, dan juga pajak dikenakan juga kepada orang-orang yang kurang mampu dan hal seperti itu yang membuat pajak dirasakan kurang adil. Pembayaran zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim dan peruntukannya sangat jelas didalam *al-Qur'ān* kepada siapa zakat tersebut diberikan.

Penuturan Saudara AH (Subjek 5)

“Zakat tu udah perintah yang wajib, disatu sisi agama yang memaksa untuk membayar zakat tapi ikhlas aja kalo mengeluarkan zakat, kalo pajak bayarannya tu paksaan. kalo usaha saya ni kena PPh 1,5% dan PPN 10%.”¹⁰³

¹⁰²Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

¹⁰³Hasil wawancara dengan Saudara AH pada Hari Kamis 07 April 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek AH menyatakan bahwa zakat merupakan perintah yang wajib dikeluarkan dan dalam pengeluarannya pun sesuai dengan keikhlasan, sedangkan pembayaran pajak dilakukan karena adanya paksaan yang membuat bayar pajak tersebut menjadi beban untuk membayarnya.

Sistem pembayaran zakat dan pajak yang dilakukan secara terpisah oleh 5 pengusaha, Bapak HH, P, Ibu AW. AWK, AH adapun kebijakan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sistem pembayarannya tidak dilakukan oleh pengusaha ini, disebabkan dalam pembayaran zakat tidak kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Padahal adanya pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan lebih efektif apabila adanya kelebihan pembayaran pajak, maka ada kebijakan Ditjen pajak yang menyatakan bahwa kelebihan tersebut dialihkan untuk membayar zakat.

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak seharusnya dapat direalisasikan kepada masyarakat, sesuai dengan teori kesadaran hukum yang terletak pada BAB II perlu adanya kesadaran hukum pada diri setiap individu agar hukum itu menjadi selaras, seimbang dan serasi di masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum melalui proses kejiwaan, manusia

membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Kesadaran hukum tersebut membuat masyarakat atau pengusaha ikut berpartisipasi dalam memajukan Negeranya, karena dengan adanya kesadaran tersebut itulah masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya mampu berkontribusi untuk kepentingan umum. seperti pembayaran zakat yang dilakukan oleh pengusaha memberikan makna bagi kehidupan sosial bahwa zakat mampu menumbuhkan rasa tolong menolong antara si kaya dan si miskin tidak adanya perbedaan antar umat dan dengan zakat memperat hubungan antar sesama.

Begitu pun halnya dengan pembayaran pajak yang dilakukan dibayar sesuai dengan penghasilan dari pengusaha dipotong dari laba kotor usaha. Pemerintah sangat tegas kepada para pengusaha untuk mewajibkan mempunyai NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) karena tidak adanya NPWP maka usaha yang dijalankan diberhentikan oleh pemerintah.

Ketetapan bagi pengusaha untuk membayar pajak sudah ditetapkan oleh perundang-undangan yang mana undang-undang tersebut harus ditaati sebagai warga Negara yang baik. Pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha yaitu PPh, PPn, PBB, dan IMB yang mana pajak tersebut harus disetorkan pertahun, pada waktu itu pemerintah membuat kebijakan pajak dibayar perbulan, tetapi karena para

pengusaha tidak mampu untuk membayar perbulan maka pemerintah memberikan keringanan menjadi pertahun.

Kantor pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan adanya pembayaran pajak secara *on line*, jadi wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama untuk dilayani pembayarannya, dan waktu tidak terbuang sia-sia, sistem *on line* ini diberlakukan juga di Kota Palangka Raya, menurut AWK salah satu pengusaha yang memakai sistem *on line* ini.

Adanya kebijakan dari pemerintah agar pengusaha membuat NPWP membuat para pengusaha ini membayarkan pajak secara paksa, dengan adanya paksaan tersebut pengusaha mempunyai kesadaran untuk melaksanakan aturan yang diberlakukan. Begitu juga hal nya dengan membayar zakat, dari pengusaha yang peneliti wawancarai seperti Bapak HH, P, Ibu AW, AWK dan AH menyatakan membayarkan zakatnya 2,5% sesuai syariat yang telah ditetapkan, zakat yang sudah ditetapkan tidak bisa dilanggar karena sudah menjadi ajaran Islam dan merupakan kebiasaan dari seorang Muslim untuk menjalankannya.

b. Budaya Zakat Pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya

Secara bahasa kata budaya berarti pikiran atau akal budi, atau hasil dari pikiran dan akal budi. Menurut istilah kata budaya sama hal nya dengan kebudayaan yaitu segala bentuk hasil kegiatan dan

penciptaan batin akal budi manusia yang terlahir ke dalam beberapa wujud seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.¹⁰⁴

Poin budaya ini sesuai dengan penuturan dari para pengusaha tentang zakat yang dilakukan oleh pengusaha dalam membayarkan zakatnya. Adanya budaya ini zakat adalah aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia, dalam masyarakat yang terlahir dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Budaya sama halnya dengan kebiasaan yang dilakukan karena telah bersifat permanen dalam masyarakat maupun dari masing-masing individu pengusaha itu sendiri. Adanya budaya zakat yang diajarkan oleh Islam membuat pengusaha itu tersadar bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan kebiasaan pada zaman Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pengusaha mengenai budaya dalam membayarkan zakatnya sesuai dengan keinginan dan kemauan kepada siapa zakat itu diberikan. Mayoritas pengusaha masih sporadis yang mana membayarnya masih kehendak dan sesuka hati kemana hendak membayarnya. Apakah dalam membayar zakat, Anda membayar ke lembaga pemerintah atau langsung kepada yang membutuhkan?

Penuturan Bapak HH (Subjek 1)

¹⁰⁴Muh. Asnawi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Semarang : Aneka Ilmu, 2009. h. 2

“Kalo saya ke nurul fikri aja sih soalnya di nurul fikri juga hampir sama dengan lembaga pemerintah, tidak hanya memberdayakan zakat tetapi ada kegiatan-kegiatan sosial yang membantu sesama.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak HH, dalam membayarkan zakatnya lebih memilih kepada lembaga Nurul Fikri karena lembaga tersebut mirip dengan BAZNAS, ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang membantu sesama.

Penuturan Saudara P (Subjek 2)

“Bayar zakat ke nurul fikri sih kadang tapi lebih sering langsung ke orangnya, ngundang anak yatim piatu juga kalo bulan ramadhan. Untuk tahun semalam bayar ke nurul fikri tapi untuk tahun sekarang belum tau ngasih zakatnya kemana lagi.”¹⁰⁶

Pernyataan dari Saudara P mengenai pembayaran zakat dilakukan secara langsung diberikan kepada yang berhak, dan mengundang anak yatim piatu setiap bulan Ramadhan untuk mensyukuri atas penghasilan yang lebih sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang sekitar, untuk menjalin silaturahmi antar umat Muslim.

Penuturan Ibu AW (Subjek 3)

“Ku kasih kan langsung ke orang yang membutuhkan, ga paham aku yang ke BAZNAS cara bayarnya, ku keluarkan zakatnya yang wajib aja yang setahun sekali, kalo yang perbulan melalui infak.”¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara dengan Subjek Ibu AW menyatakan pembayaran zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak HH pada Hari Kamis 09 Maret 2017

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Saudara P pada Hari Rabu 08 Maret 2017

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu AW pada Hari Kamis 30 Maret 2017

akan mempermudah untuk menunaikannya, sedangkan membayar zakat kepada lembaga seperti BAZNAS tidak mengetahui prosedur tata cara pembayarannya karena kurangnya informasi.

Penuturan Saudara AWK (Subjek 4)

“zakat fitrah ngasihnya ke mesjid, kalo yang zakat *mal* nya ngasihnya ke karyawan sendiri, orang yang kita kenal aja masih ada yang membutuhkan, kenapa kita harus ngasih jauh-jauh.”¹⁰⁸

Menurut Saudara AWK dalam membayarkan zakat fitrah diberikan kepada masjid, dan zakat *mal* diberikan kepada karyawannya sendiri, orang yang disekitar masih ada yang membutuhkan, tidak harus jauh-jauh untuk memberikan zakat.

Penuturan Saudara AH (Subjek 5)

“Masyarakat Indonesia masih sporadis, ngasihnya masih suka-suka yang dia mau aja tempatnya baru ngasih zakatnya ke situ, kadang bayar ke Nurul Fikri, ngasih ke organisasi seperti HMI itung-itung bantu-bantu organisasi itu lah.”¹⁰⁹

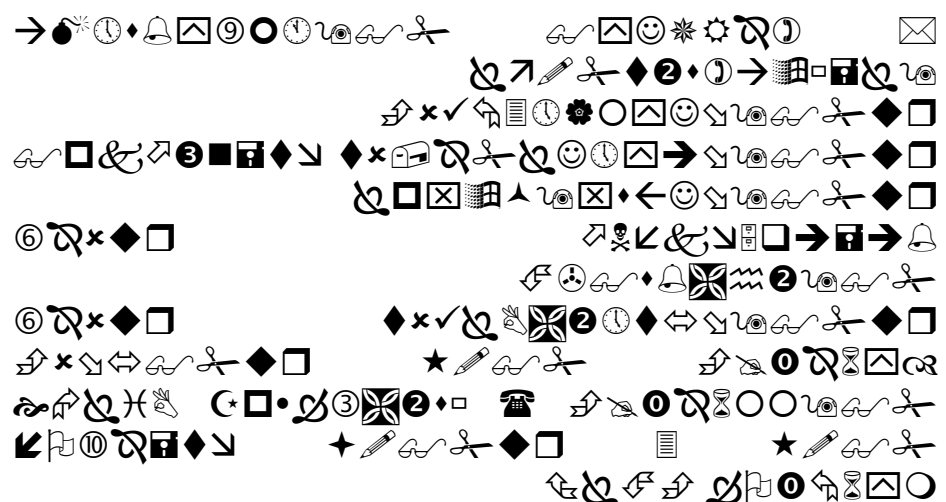
Berdasarkan wawancara dengan Saudara AH, masyarakat Indonesia masih bersifat sporadis yang mana memberikan zakatnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Terkadang Saudara AH membayarkan zakatnya kepada lembaga Nurul Fikri dan juga kepada organisasi

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Saudara AH HARI Kamis 07 April 2017

masyarakat yang berbentuk Islam seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Pandangan dari pengusaha seperti Bapak HH, P, Ibu AW, AWK, dan AH pengusaha mengenai pembayaran zakat yang dilakukan secara langsung diberikan kepada yang membutuhkan lebih efektif dibandingkan memberikan zakat kepada BAZNAS, karena harta yang diberikan tidak menjadi sia-sia. Apabila zakat tersebut diberikan kepada BAZNAS belum tentu zakat tersebut diberikan langsung kepada yang berhak, bahkan dijadikan ladang bisnis dan dikomersilkan oleh orang-orang yang mengelola BAZNAS. Seperti QS. At-Taubah : 9 : 60 yang terdapat pada BAB II deskripsi teoritik mengenai dasar hukum zakat yang berbunyi :



Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 9 : 60)

Berdasarkan ayat QS. At-Taubah: 9 : 60 menjelaskan bahwa zakat hanyalah untuk orang-orang yang memerlukan, maka pengusaha Bapak HH, P, Ibu AW, AWK, dan AH berasumsi zakat diberikan secara langsung memberikan kemaslahatan untuk orang yang membutuhkan, karena zakat tersebut wajib diberikan kepada 8 *asnaf* yang tertera pada ayat tersebut. Sehingga memberikan secara langsung mempunyai kesan tersendiri bagi *muzakki*, karena dengan tindakan yang seperti ini memberikan arti mengenai kehidupan, bahwasannya masih banyak saudara-saudara seiman yang masih memerlukan zakat tersebut, dan memberikan secara langsung menumbuhkan rasa simpati kepada sesama.

Budaya pengusaha dalam membayarkan zakatnya sudah terbiasa dengan membayarkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Pembayaran zakat secara langsung mengesankan bahwa zakat dapat dipastikan tepat sasaran, meskipun dengan konsep ini telah terjadi penumpukan harta zakat pada satu *mustahiq* saja dan terjadi kerawanan sosial lainnya.¹¹⁰

Pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS menurut para pengusaha tidak transparan dan dianggap tidak mempunyai peran dalam memberdayakan zakat, sehingga rasa percaya pengusaha terhadap

¹¹⁰ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...* h. 215

BAZNAS minim sekali ketika hartanya dikelola oleh BAZNAS. Budaya yang sudah melekat di masyarakat luas tidak bisa dihilangkan begitu saja, harus melakukan gerakan yang mampu mendoktrin masyarakat agar mengubah pola pikir dalam membayarkan zakatnya.

Kebudayaan yang seperti ini bisa saja dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya terutama dari keluarga *muzakki* itu sendiri, apabila dari keluarga tidak dikenalkan BAZNAS yang mengelola zakat, maka keturunannya pun tidak mengenal dan tidak mengetahui fungsi dari BAZNAS, dan akan mengikuti jejak atau *uswah* dari keluarganya yang memberikan zakat secara langsung atau ke masjid.

Menurut hemat peneliti untuk menarik minat pengusaha agar mempunyai keinginan untuk berzakat kepada BAZNAS, buatlah struktur organisasi yang mempunyai kewenangan dalam mengelola zakat tidak hanya didengungkan lewat undang-undang tetapi lewat syiar-syiar Islam seperti khutbah, dakwah ataupun media sosial yang dimana masyarakat sekarang adalah masyarakat yang modern. Sehingga dengan adanya aktivitas seperti itu membuat pengusaha atau masyarakat luas semakin tersadar bahwasannya zakat merupakan suatu kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan, karena zakat merupakan rukun Islam yang harus dipenuhi kewajibannya.

Keadaan masyarakat atau pengusaha itu sendiri mempunyai latar belakang yang berbeda, ada yang pengusaha sangat religious,

akademisnya baik, dan ada juga pengusaha yang menamatkan sekolahnya ditingkat menengah atas. Mayoritas pengusaha yang peneliti wawancarai masing-masing mempunyai argumen mengenai BAZNAS, walaupun dari paradigma pengusaha tersebut ada yang belum teruji kebenarannya mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Pengetahuan pengusaha mengenai BAZNAS dirasa tidak terlalu menggali secara mendalam, asumsi pengusaha yang terpenting telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, sehingga untuk mengetahui secara mendalam lembaga pemerintah ini secara keseluruhan tidak optimal pengusaha dalam mengetahuinya.

3. Implementasi Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya

a. Sinergi Hubungan Antara Sistem Pembayaran Zakat dan Pembayaran Pajak di Kota Palangka Raya

Sistem pembayaran zakat yang marak dilakukan oleh para pengusaha dengan memberikan langsung kepada yang berhak dan penghitungan yang telah ditetapkan oleh syariat, harta yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari penghasilan. Adapun penghitungan yang dilakukan tidak serumit dengan penghitungan pajak, sistem pembayaran pajak yang diberlakukan tata cara penghitungannya tidak semudah dengan penghitungan zakat.

Sistem pembayaran pajak di Kota Palangka Raya yang peneliti ketahui dari pengusaha, sistemnya sedikit memaksa masyarakat, tidak melihat latar belakang masyarakatnya, pemungutan pajak dilakukan kepada orang yang tidak mampu juga diberlakukan, serta peruntukkan pajak diberikan kepada siapa seperti tidak ada sasaran.

Pajak hampir menjurus kepada riba, karena pajak menggunakan sanksi apabila terlambat membayar pajak tidak sesuai dengan tanggal atau tahun yang ditentukan maka wajib pajak tersebut diberikan denda, dan denda tersebut masih dipertanyakan oleh masyarakat kepada siapa uang denda tersebut diberikan, padahal pengusaha ini membayar pajak dan melaporkan pajaknya pertahun, apabila pajak tersebut dikumpulkan maka pajak yang harus dikeluarkan pun jumlahnya besar.

Undang-undang Perpajakan menganut sistem *self assessment*. Dalam hal ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau dapat juga disampaikan melalui kantor pos, mobil pajak keliling dan tempat khusus penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan atau

pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem *self assessment*.¹¹¹

Pajak memang merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Bagi umat Islam, ada kewajiban lain terkait pemotongan harta yaitu zakat. Umat Islam tidak perlu mempertentangkan kedua kewajiban tersebut, karena dalam sistem ekonomi Islam dikenal dua sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yaitu zakat dan pajak. Zakat dan pajak, meskipun sama-sama kewajiban tetapi mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam penggunaannya dan pemungutan, sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh *Ulil Amri*/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Sistem pembayaran pajak yang diberlakukan terkadang masih menjadi pertanyaan dikalangan pengusaha maupun dikalangan masyarakat, pengusaha telah membayarkan pajaknya begitu juga dengan masyarakat, tapi sampai hari ini pun di Kota Palangka Raya khususnya masih ada jalanan yang rusak daerah-daerah yang masih terisolir, dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

¹¹¹Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh dan WP Badan)* : Jakarta, 2010. h. vii

Sistem pembayaran zakat dan pajak sangat jauh perbedaannya, walaupun tujuan dari zakat dan pajak adalah mengentaskan kemiskinan, tetapi fakta yang terjadi dikalangan pengusaha mempunyai pandangan yang khusus terhadap pajak itu sendiri, para pengusaha sangat mengkritisi sistem pembayaran pajak yang diberlakukan, karena pengelolaan pajak yang dilakukan masih bersifat konvensional dan menganut sistem kapitalisme yang mana ada pihak yang masih tertindas. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Saudara AWK berikut pernyataanya :

“Indonesia sudah menganut sistem ekonomi kapitalis yang dimana suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu sesama tapi semuanya dikomersilkan dijadikan sebagai ladang bisnis.”¹¹²

Bukti bahwasannya pengusaha yang peneliti wawancarai masih peduli dengan masyarakat yang memang masih membutuhkan uluran dari pemerintah, tidak membebankan salah satu pihak yang mana penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan harian seperti makan dan minum.

Hubungan sistem pembayaran zakat dengan pembayaran pajak, merupakan dualisme yang tidak dapat dipisahkan karena kedua instrumen ini merupakan penghubung untuk membantu sesama yang masih membutuhkan. Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam, memiliki tujuan dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai

¹¹²Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia.

Menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis utama disyariatkan zakat. Tujuan (*maqāsid*) inilah zakat yang suci dan sesungguhnya, namun untuk melaksanakan zakat sebagai instrumen ekonomi di Indonesia, telah terjadi multi paradigma. Salah satunya bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah direpresentasikan oleh pajak, sehingga zakat tidak diperlukan lagi. Penyelesaian untuk masalah yang terjadi cukup relevan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* guna mewujudkan keadilan dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup atau jiwa manusia.¹¹³

Maqāsid asy-syarī'ah adalah tujuan hukum Islam yang mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman, dan kesejahteraan. Ditilik secara luas bahwasanya zakat dan pajak adalah instrumen ekonomi Negara yang mampu menghimpun pengeluaran dan pemasukan Negara guna memfasilitasi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Adanya zakat dan pajak mampu melakukan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera, dan makmur dalam bidang ekonominya. Apabila zakat dan pajak dapat bersinergi bagi ekonomi Indonesia maka masyarakat akan dijamin tidak

¹¹³ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat...*h.31

ada yang kelaparan dan miskin, sekarang melihat secara realita perpajakan mengambil dana dari masyarakat dengan menetapkan sanksi berupa denda membuat masyarakat terbebani akan adanya pajak ini.

Pemungutan dana dari masyarakat berupa pajak, masyarakat masih ada saja yang miskin dan tinggal di tempat yang tidak layak, padahal dana pajak tersebut untuk memfasilitasi masyarakat, namun dana tersebut bergulir hanya untuk orang-orang yang berkuasa, sedangkan masyarakatnya masih memerlukan uluran dari pemerintah dan perhatian yang khusus untuk dirangkul dan diberikan kemudahan dalam bentuk permodalan agar perekonomiannya membaik. Berarti teori *maqāsid asy-syarī'ah* dalam sistem pajak belum mampu untuk direalisasikan kepada masyarakat, karena sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden sekarang sangat menganut kepada Pancasila dan nasionalis yang tinggi. Akan adanya kekhawatiran dikalangan mereka apabila hukum Indonesia penuh dengan syariat Islam, maka sistem yang sifatnya syariat dapat menghancurkan Negara.

Diantara kedua instrumen ini dapat disinergikan apabila pengelolaan zakat dan pajak diatur sesuai dengan syariat, apabila kantor pajak mampu bekerja sama dengan kantor BAZNAS maka sistem pembayaran bisa dilakukan hanya satu tempat yaitu di BAZNAS, karena mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Muslim maka BAZNAS merupakan tempat sebagai *baitul mal* nya umat Muslim, dan

dikelola secara wajib oleh Negara dan tidak bersifat hanya sukarela dari Negara.

Pada zaman Rasulullah *baitul mal* merupakan wadah penerimaan anggaran Negara dan pengeluaran anggaran Negara, termasuk orang-orang non Muslim pada zaman Nabi, turut berpartisipasi untuk membayarkan pajaknya di *baitul mal*. Menurut hemat peneliti, pemikiran peneliti diperoleh dari beberapa referensi sumber buku maka, pembayaran zakat dapat dialokasikan kepada lembaga keuangan yang berbentuk syariah, seperti lembaga perbankan mampu menyerap pembayaran zakat masyarakat Muslim sehingga pembayaran tidak ada terjadi kesalah pahaman dari masyarakat maupun dari pengusaha, karena dengan adanya lembaga perbankan yang melayani zakat, pendistribusian dana untuk *mustahiq* akan tepat sasaran.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat maupun pengusaha tidak bisa bersifat sporadis, karena pajak merupakan penerimaan anggaran yang langsung terhubung oleh pemerintah pusat, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sistemnya sendiri untuk mengelola pendistribusian pajak.

b. Sosialisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Palangka Raya

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia senantiasa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Proses ini dapat disebut proses penyesuaian diri individu ke dalam kehidupan sosial, atau lebih singkat dapat disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat.¹¹⁴

Sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dimasyarakat maupun pengusaha di Kota Palangka Raya menunjukkan dari pemerintah tidak ada gerakan untuk mengaktifkan program ini, melainkan hanya menjadi himbauan tetapi tidak ada *action* dari BAZNAS untuk menyebarkan lewat media massa.

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mampu dilaksanakan apabila ada sosialisasi dari BAZNAS ataupun Kantor pajak untuk mengaplikasikannya. Perlunya sosialisasi agar masyarakat atau pengusaha khususnya lebih mengenal dan lebih mengetahui zakat

¹¹⁴Abdulsyani, *Sosialiogi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994. h. 57

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sesuai dari penuturan *staff* pegawai yang bekerja di BAZNAS, berikut pernyataannya:

“Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dipusat sudah diberlakukan, kendala dari sosialisasi yang dilakukan kurang adanya antusias dari pihak kantor pajak, sebenarnya dari BAZNAS telah mensosialisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut, tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak kantor pajak. Adanya kendala juga berasal dari masyarakat atau pengusaha yang hendak membayar zakat, setiap tahun memang rutin membayarkan zakat, tetapi membayarkan zakatnya tidak di kantor BAZNAS, sehingga zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sampai sekarang belum dapat terealisasi.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan *staff* yang bekerja di kantor BAZNAS, bahwasannya upaya sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, tetapi adanya kendala yang dialami dalam mensosialisasikannya yaitu masyarakat tidak membayarkan zakatnya di kantor BAZNAS sehingga sosialisasi kepada masyarakat tidak mencakup secara meluas. Kurangnya kerja sama antara kantor pajak tidak mendapatkan respon yang baik sehingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak terealisasi.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada para pengusaha, peneliti mengajukan pertanyaan, “apakah kebijakan pemerintah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah baik belum dalam mensosialisasikannya?”

¹¹⁵Hasil dari wawancara dengan *staff* pegawai yang berada di Kantor BAZNAS Provinsi pada Hari Senin 27 Februari 2017

Penuturan Bapak HH (Subjek1)

“Mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu udah lama tau, tapi upaya sosialisasi itu harus ditingkatkan supaya masyarakatnya memahami semua, dan juga harus adanya jemput bola dari pemerintah tidak hanya masyarakatnya yang aktif pemerintah pun harus ikut andil mengenai ini.”¹¹⁶

Bapak HH memberikan pernyataan bahwasannya upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakatnya memahami mengenai kebijakan ini, dan pemerintah juga menjemput bola maksud dari menjemput bola itu sendiri, pemerintah tidak hanya duduk diam tetapi ada gerakan untuk kebijakan yang dibuat.

Penuturan Saudara P (Subjek 2)

“ belum baik soalnya sosialisasinya ga sampe.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Saudara P, mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak baik dalam sosialisasinya karena informasi tidak sampai kepada Saudara P.

Penuturan Ibu AW (Subjek 3)

“belum pernah diajak sosialisasi tentang ini makanya ga tau, aku rajin ja kalo ada sosialisasi tu ikut, kalo ada pelatihan dari desperindag aku ikut.”¹¹⁸

Pernyataan dari Ibu AW mengungkapkan bahwasannya mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak AW belum pernah diajak

¹¹⁶ Hasil dari wawancara dengan Bapak HH pada Hari Kamis 09 Maret 2017

¹¹⁷ Hasil dari wawancara dengan Saudara P pada Hari Rabu 08 Maret 2017

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu AW pada Hari Kamis 30 Maret 2017

untuk mengikuti sosialisasi perihal ini oleh karena itu Ibu AW tidak mengetahui adanya kebijakan pemerintah mengenai hal ini. Apabila ada sosialisasi kepada masyarakat Ibu AW termasuk orang yang aktif dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan, seperti mengikuti sosialisasi apapun.

Penuturan Saudara AWK (Subjek 4)

“belum baik, karena emang ga sampe sosialisasinya.”¹¹⁹

Berdasarkan pernyataan dari Saudara AWK sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak tersosialisasikan dengan baik, karena tidak ada info yang memberitakan hal tersebut.

Penuturan Saudara AH (Subjek 5)

“Sosialisasi dari pemerintah juga kurang waktu bayar pajak ga ada dikasih tau kalo zakat bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.”¹²⁰

Pernyataan dari Saudara AH bahwasannya sosialisasi dari pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tidak diberitahukan zakat sebagai pengurang penghasilan diberlakukan, karena dari pihak kantor pajak tidak memberikan informasi mengenai hal ini.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Saudara AWK pada Hari Kamis 07 April 2017

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Saudara AH pada Hari Kamis 07 April 2017

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pernyataan dari Bapak HH, P, Ibu AW, AWK, dan AH sosialisasi yang dilakukan tidak sampai informasinya kepada para pengusaha ini, disebabkan dari kantor pajak tidak memberitahukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat direalisasikan di Palangka Raya. Pemerintah perlu melakukan jemput bola yang mana tidak hanya menunggu apabila *muzakki* membayarkan zakatnya ke BAZNAS baru disosialisasikan, tetapi adanya gerakan aktif dari pemerintah agar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini bisa diaktifkan.

Menurut hemat peneliti sosialisasi dilakukan tidak hanya di pemerintahan pusat tapi melakukan sosialisasi secara menyeluruh kalau perlu sampai pelosok Negeri Indonesia mengetahui adanya hal ini. Sosialisasi harus mempunyai pondasi yang kuat serta tindakan yang langsung cepat tanggap, tidak hanya mensosialisasikan tetapi pihak yang mensosialisasikan harus mengikuti sesuai dengan yang disosialisasikan kepada masyarakat atau para pengusaha.

Upaya untuk mensosialisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tidak cukup hanya dilakukan oleh BAZNAS dan Kementrian Agama saja. Tetapi membutuhkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait, terutama jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Koordinasi, kerjasama dan sinergi itulah

yang ke depan perlu dibangun ditingkat institusi, karena bagi umat Islam zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang seiring dan paralel.

c. Implementasi Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dikalangan Pengusaha Muslim Kecamatan Jekan Raya

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha masih asing didengar oleh para pengusaha, ada sebagian dari pengusaha yang mengetahui hal ini tapi tidak diaplikasikan ketika membayarkan zakat. Asumsi dari pengusaha pembayaran zakat dilakukan sudah sesuai syariat, maka tidak perlu ada yang dipermasalahkan menurut para pengusaha ini.

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak akan memberikan dampak apapun kepada para pengusaha, karena pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha lebih banyak dibandingkan dari keuntungan yang didapat setiap bulannya. Terkadang pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha tertunda karena pemasukan usaha berkurang, sehingga pajak dikenakan dua kali lipat dari biasanya.

Zakat yang dibayarkan oleh pengusaha tidak melalui BAZNAS maka zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak diberlakukan kepada pengusaha yang zakatnya tidak diberikan kepada BAZNAS. Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 yang berbunyi :

“zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”¹²¹

Sesuai dengan perundang-undangan sebagai patokan makaikutilah patokan tersebut oleh *staff* yang bekerja di BAZNAS. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan pengusaha kurang populer dan minat dari pengusaha itu sendiri kurang, sehingga kalah saing dengan program pajak yaitu *tax amnesty* pada tahun lalu diberlakukan, sampai menjadi iklan komersil yang menarik minat wajib pajak untuk melakukannya.

Sedangkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan program BAZNAS yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi partisipasi dari masyarakat khususnya pengusaha kurang, padahal dengan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak beban pengusaha untuk membayar pajak merasa lebih ringan, walaupun yang hanya dikurangi pajak penghasilannya saja.

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah berlaku sejak 2001. Namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (*muzakki*) yang belum memanfaatkan pengurang penghasilan bruto atas pajak penghasilan tersebut. Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait PPh adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

¹²¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto.¹²²

Menurut hemat peneliti zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kurang direspon oleh pengusaha maupun masyarakat, karena dari pihak pemerintah tidak ada gerakan dan keseriusan agar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dilakukan diberbagai penjuru Kota tidak hanya diberlakukan di pemerintahan pusat.

Adanya keseriusan dari pemerintah untuk mengampanyekan hal ini menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya agar program ini tidak hilang begitu saja, zakat sebagai pengurang penghasilan ditetapkan di perundang-undangan sangat lama telah disahkan, tetapi gerakan pemerintah sangat lemah karena tidak ada yang mendukung dari pihak manapun sehingga program tersebut hilang begitu saja.

Pembuatan perundang-undangan memakai anggaran pemerintah dan anggaran tersebut dari dana masyarakat, tetapi perundang-undangan hanya dijadikan sebagai formalitas dan dana masyarakat dipakai untuk hal yang sia-sia. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab agar perundang-undangan diundangkan dengan cara yang serius agar zakat sebagai

¹²² Admin, “ Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/posko-Aceh/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak>, Online Hari Selasa 06 Juni 2017 pukul 06.45 WIB

pengurang penghasilan kena pajak dikenal oleh masyarakat banyak dan khususnya pengusaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh dari lapangan, berikut adalah kesimpulannya :

1. Perspektif pengusaha Muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka mengenai program BAZNAS zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak memahami tata cara penghitungannya dan tidak sampai kepada pengusaha program yang diberlakukan oleh BAZNAS.
2. Kesadaran pengusaha akan membayar zakat yang didasari dari kesadaran diri sendiri. Begitu juga dengan pajak walaupun kesadaran tersebut tidak murni dari kesadaran sendiri, adanya keterpaksaan yang membuat pengusaha sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Peraturan pemerintah yang membuat pengusaha ini menaati hukum yang diberlakukan, kesadaran hukum yang dilakukan para pengusaha ada yang bertolak belakang dan ada juga yang menaati hukum yang diberlakukan.
3. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sampai saat ini tidak terealisasi dengan baik, karena sosialisasi dari pemerintah kurang serius dalam menangani hal ini. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak akan memberikan dampak apapun kepada para pengusaha, karena pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha lebih

banyak dibandingkan dari keuntungan yang didapat setiap bulannya. Terkadang pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha tertunda karena pemasukan usaha berkurang, sehingga pajak dikenakan dua kali lipat dari biasanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, bahwa ada beberapa pengusaha Muslim Kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat untuk membayar atau menunaikan pajak dan zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu peneliti memberi saran, yaitu :

1. Untuk pengusaha Muslim yang telah berjalan usahanya dari lamanya usaha itu berdiri dan sampai berkembang pesat, seyogya nya pengusaha tetap mempertahankan kesadaran untuk membayar zakat dan pajak walaupun dalam mengeluarkan dananya untuk pajak agak terpaksa tetap lakukan lah kegiatan kemasyarakatan tersebut, bahkan tidak mengetahui peruntukannya kepada siapa hak tersebut diberikan, dan tetap berfikir positif uang Negara diberikan kembali kepada masyarakat berupa fasilitas, meskipun tidak langsung tanggap pemerintah dalam menangani fasilitas yang rusak akan tetapi ada saja hikmah dibalik semua yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Palangka Raya.
2. Untuk BAZNAS agar bisa mensosialisasikan kembali zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada masyarakat terutama pengusaha

Muslim, program ini kurang ditekankan dan terlalu cepat program ini hilang dari peredaran sehingga belum sempat diketahui oleh masyarakat luas. Seharusnya BAZNAS mampu bekerja sama dengan Direktorat Pajak mengenai program yang dibuat, tanpa adanya kerja sama tersebut maka program BAZNAS tidak akan berjalan. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terdapat pada perundang-undangan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang pengelolaan zakat dan itupun perundang-undangan direvisi beberapa kali, tetapi penerapan perundang-undangan tidak sampai ke masyarakat, sebagai apa undang-undang dibuat kalau bukan untuk menata Negara agar menjadi lebih baik. BAZNAS merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah seharusnya mampu menarik masyarakat agar mau untuk membayar zakat ke BAZNAS, dan lebih aktif lagi ketika menjalankan sebuah program, Indonesia ini Negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang harusnya mampu untuk membuat masyarakat berminat untuk membayar zakatnya ke BAZNAS, bahkan program pajak saja mampu menarik masyarakat agar menyetorkan pajaknya dan masyarakat itu pun antusias adanya program dari perpajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, *Sosialiogi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Apriliana, Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan, Skripsi UIN Jakarta 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- _____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Asnawi, Muh. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Semarang : Aneka Ilmu, 2009.
- Azwar, Adiwarmanto, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jekan Raya dalam Angka 2014*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2014. h. ix
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Fauzia, Ika Yulia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, t.th.
- Dakhoir, Ahmad, *Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015.

- Effendi ,Satria & M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari Prilaku Kehidupan Rasulullah SAW*, Surabaya : Pustaka Adil, 2010.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:BumiAksara, 2008.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh dan WP Badan)* : Jakarta, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011.
- Mariah, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Zakat di Kabupaten Bekasi)* Skripsi Universitas Islam Negeri 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2004.
- Muhadjir, Noeng , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang :Intimedia, 2014.
- Nasution, *Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h. 98.
- PO Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : Andi, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Fikh Al-zakat* ,Beirut : Muasaah al-risalah, Juz, I 1997 Cet. 4
- _____, *Hukum Zakat*, Jakarta : Lentera, 1991.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.

- Sabiq, Al-Sayyid, *Fikih al-sunnah 3*, Bandung : Al-Ma'arif, 1990.
- Sarwono, Jonathan , *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Sumarsan,Thomas, *Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru) Edisi 3*, Jakarta : PT. Indeks, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarto , Achmad, *Mutiara Hadis Bukhari- Muslim*, Surabaya: Karya Agung, t.th.
- Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : Widia Karya, 2005.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013
- Tanzeh ,Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta:Penerbit Teras, 2011,
- Uman,Khairul, &A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- Umar,Nasaruddin, *40 Seni Hidup Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Quran, As-Sunnah dan Salafush Shaalih*, Semarang, Pesantren Karya & Wirausaha Basmala Indonesia, 2005.
- Widagdo, Baroto, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Sukoharjo) Skripsi Universitas Muhammadiyah Surarkarta, 2009.
- Yunus,Sabari, Hadi, *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Zuriah,Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendididkan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Jurnal

- Rahmaniar, “ Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya)”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume V, Nomor 1, Juni 2008, h. 14-15

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Mentri Keuangan nomor 254 /PMK.03/2012.

Artikel

Admin, “ Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/posko-Aceh/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak>, (Diakses Hari Selasa 06 Juni 2017 pukul 06.45 WIB)

Admin, “Definisi Menurut Para Ahli” diambil dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang> (diakses pada Hari Selasa 04 Juli 2017 pukul 10.00 WIB)

Manda, “Keuntungan dan Etika Bisnis” diambil dari <http://artikamanda.blogspot.co.id/2012/10/keuntungan-dan-etika-bisnis.html> .(Diakses pada Hari Rabu, 01 Februari 2017 pukul : 15.00 WIB)

Nur Kholis, “ Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia” Diambil dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia>(Diakses pada Hari Rabu 01 Februari 2017 pukul : 14.30 WIB)

Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Tapanuli Selatan : Universitas Muhammadiyah t.th.